

**Bantuan Humanitarian Shanti Volunteer Assosiation dalam
Penangana Pasca Bencana Alam 2018 di Sulawesi Tengah**



SKRIPSI:

*Disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada program
Studi Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh:

Fadhilah Mujahid Akbar

4515023005

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**Bantuan Humanitarian Shanti Volunteer Assosiation dalam Penanganan Pasca
Bencana Alam 2018 di Sulawesi Tengah**

Fadhilah Mujahid Akbar

4515023005

Skripsi telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian
Skripsi pada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa

Makassar, 24 Juni 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



Zulkhair Burhan, S.IP., M.A.

Finahliyah Hasan, S.IP., M.A.

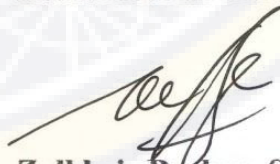
Mengetahui,

Dekan FISIP Universitas Bosowa

Ketua Prodi HI Universitas Bosowa



Arief Wicaksono, S.IP., M.A.



Zulkhair Burhan, S.IP., M.A.

ABSTRAK

Fadhilah Mujahid Akbar, 4514023005. **Bantuan Humanitarian Shanti Volunteer Assosiation dalam Penangana Pasca Bencana Alam 2018 di Sulawesi Tengah** dibimbing oleh **Bapak Zulkhair Burhan,S.Ip, MA** dan **Ibu Finaliyah Hasan, S.Ip, MA** masing-masing selaku pembimbing I dan II di Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kontribusi Shanti Volunteer Assosiation sebagai NGO yang bergerak dalam bidang kemanusiaan untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi para korban pasca bencana di kabupaten Sigi dan Donggala. Yang merupakan lokasi terdampak dengan jumlah korban pengungsi terbesar akibat bencana gempa bumi, liqfaksi dan tsunami. Melalui manajemen bencana yang terdiri dari tanggapan setelah bencana dan pemeulihan bencana. SVA dapat membentuk program-program dan menyediakan kebutuhan bagi para korban yang membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Dengan manajemen yang tersusun dan terencana, SVA sebagai NGO dapat membantu pemerintah dalma mengurangi jatuhnya korban akibat bencana alam, salah satunya adalah program bantuan cepat tanggap yang dijalankan SVA dalam membantu masyarakat di beberapa titik lokasi yang tidak dijangkau bantuan dari pemerintah. Setelah itu SVA menjalankan program pemulihan ekonomi perempuan. Dimana bantuan yang diberikan berdasarkan berdasarkan kegiatan masyarakat sebelum terjadi bencana, tidak hanya pemberian alat tetapi SVA juga melakukan pelatihan terhadap masyarakat dalam mengelola produk pertanian mereka.

Kata Kunci: Bantuan Kemanusiaan, SVA, Pemuliah bencana, Manajemen Bencana.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robilalamin penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya dalam penyelesaian penulisan tugas akhir penelitian yang berjudul Bantuan Humanitarian Shanti Volunteer Assosiation dalam Penangana Pasca Bencana Alam 2018 di Sulawesi Tengah, yang merupakan syarat kelulusan menjadi seorang sarjana di Program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Bosowa Makassar.

Penulis mengalami begitu banyak kendala dan halangan hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa tanpa dorongan, arahan, dan masukan dari berbagai pihak, maka sangat sulit untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis menghanturkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan sumbangsih pikiran juga “jalan” hingga skripsi ini dapat dirampungkan. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta jajarannya.
2. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Makassar beserta jajarannya.
3. Bapak Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Zulkhair Burhan, S.ip., MA

4. Seluruh staf pengajar Jurusan Ilmu Hubungan Internasional atas segala ilmu yang telah diberikan dari semester awal hingga akhir.
5. Orang tua, saudara saya dan teman-teman Naldy, Harun, Rahim, Lulu dan Lina
6. Ibu Amelia Tristiana Amiruddin selaku Pimpinan UNICEF Makassar yang telah memberikan saya kesempatan berkerjasama dengan LSM lokal di Sulawesi Tengah.
7. Ibu Soraya Sultan selaku Ketua Yayasan Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKP-ST) dan kawan-kawan.
8. Bapak Zulkhair Burhan, S.ip., MA dan Ibu Finaliyah Hasan, Sip., MA atas ketulusan hati dan ilmunya dalam membimbing saya selama penulisan skripsi ini.
9. Kawan seperjuangan Cikhita Priscilla Rembang yang selalu memberi dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kawan-kawan HIMAHl angkatan 2015 terima kasih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Rancangan dan Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II TELAAH PUSTAKA

A.	Humanitarian Ation	15
A.1	Humanitarian Aids	18
A.1.1	Hal-hal yang dilakukan dalam pemberian bantuan kemanusiaan	20
A.1.1.1	Cultural Awareness	21
A.1.1.2	he “Do No Harm” Principle.....	23
A.1.1.3	Komitmen dan Kriteria Kualitas.....	24
B.	Manajment Bencana.....	27
B.1	Tahapan dan Kegiatan dalam Mengelola Manajemen Bencana	32
B.2	Post Disaster Respon.....	32
B.2.1	Emergency	34
B.2.2	Layann Sosial Darurat	38
B.2.3	Komando, kontrol, dan koordinasi	39
B.3	Disaster Recovery	40
B.3.1	Pemulihan Ekonomi.....	42
B.3.2	Tujuan, Planning, dan Action Recovery.....	44

BAB III GAMBARAN UMUM

A.	Sejarah dan Profil Shanti Volunteer Association Shanti	47
A.1	Kegiatan Bantuan Darurat	48
B.	Bencana alam Sulawesi Tengah dan Profil daerah Terdampak.	55

B.1	Profil Kabupaten Dongala	58
B.2	Profil kabupaten Sigi	61

BAB IV PEMBAHASAN

	Kontribusi Shanti Volunteer Assosiation dalam penanganan pasca bencana alam 2018 di Sulawesi Tengah.....	64
A.	Peran SVA dalam Menjalankan Bantuan Cepat tanggap	68
A.1	Bantuan Basic Paket	69
A.2	Pengumpulan data pemulihan masyarakat	71
A.3	Melakukan trauma healing di berbagai tenda-tenda pengungsi.....	72
B.	Peran SVA dalam Menjalankan Program Support for women's livelihood recovery, sebagai bantuan pemulihan ekonomi masyarakat	74
B.1	Pendistribusian Mesin	76
B.2	Pelatihan Terhadap Perempuan.....	77
B.2.1	Hasil Peoduksi Masyarakat.....	79

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	81
B.	Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada 29 September 2018 bencana gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo, yang disusul oleh gelombang tsunami di Sulawesi Tengah menelan korban sebanyak 2.256 jiwa meninggal, 1.309 orang hilang 4.612 orang luka-luka dan 223.751 orang mengungsi (bnpb.com, 2018). Tidak hanya di Sulawesi Tengah bencana alam di Indonesia marak terjadi seperti bencana yang terjadi pada tahun 2004 di Aceh yang menelan korban meninggal dan hilang sebanyak 166,388 jiwa orang dan mengungsi sebanyak 1,897,710 jiwa (bnpb.go.id). Sedangkan data pada bencana gempa bumi di Lombok tahun 2018 menelan sebanyak 555 korban jiwa dan 390.529 jiwa penduduk yang mengungsi (kompas.com, 2018). Bencana alam tidak hanya merengut korban tetapi menimbulkan kerugian bagi masyarakat terkhusus ketika kejadian di Sulawesi Tengah, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap kerugian dan kerusakan akibat bencana berdasarkan data per 20/10/2018, “mencapai lebih dari 13,82 trilyun rupiah. Dampak kerugian dan kerusakan akibat bencana ini meliputi 5 sektor yaitu sektor permukiman mencapai Rp 7,95 trilyun, sektor infrastruktur Rp 701,8 milyar, sektor ekonomi produktif Rp 1,66 trilyun, sektor sosial Rp 3,13 trilyun, dan lintas sektor mencapai Rp 378 milyar” (bnpb.com, 2018).

Melihat dari data-data diatas bahwa jumlah korban maupun kerusakan yang diakibatkan bencana sangatlah besar. Hal ini membuat bantuan kemanusiaan

berdatangan secara besar-besaran dari berbagai lembaga swasta maupun secara pribadi, dari berbagai Non Government Organization (NGO) lokal maupun internasional, dan dari pemerintah pusat yang menjadi korban maupun negara-negara lain berdatangan. Dalam hal ini bantuan dari 18 negara sahabat seperti Uni Eropa, China, Korea Selatan, Vietnam, Laos, dls telah memberikan dana sebesar Rp. 220 miliar (voaindonesia.com). Sedangkan pemerintah telah mengeluarkan anggaran penangan bencana gempa di Palu dan Donggala sebanyak Rp. 560 miliar yang akan digunakan BNPB sebagai dana pemamfaatan alokasi bencana terhadap masyarakat (liputan6.com). Namun bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah belum seluruhnya diterima oleh masyarakat diakibatkan dari kurangnya alat angkut dan jumlah tenaga manusia yang masih kurang (cnnindonesia.com, 2018).

Dalam hal ini ada beberapa organisasi yang memberikan bantuan kemanusiaan. Menurut Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial (Kemos) bahwa sebanyak 11 *Non Government Organization* (NGO) internasional telah membuat nota kesepakatan (MoU) untuk membantu korban bencana di Sulawesi Tengah (nasional.kontan.co.id, 2018). Dalam pelaksanaan pemberian bantuan terhadap para korban bencana alam, pemerintah telah menrapkan regulasi perizinan bagi bantuan asing, bahwa Lembaga asing yang ingin menyalurkan bantuan asing, harus mendaftar di kementerian sebagai *agency partners* dan harus melakukan kerjasama dengan Lembaga suadaya masyarakat (LSM) lokal dalam penyaluran bantuan dan jika Lembaga asing tidak memiliki mitra lokal maka bantuan dapat diberikan kepada Palang Merah Indonesia (PMI) yang akan didistribusikan oleh BNPB (sulteng.antaranews.com, 2018).

Salah satu NGO yang telah memiliki izin dari pemerintah untuk memberikan bantuan adalah Shanti Volunteer Assosiation (SVA) yang melakukan kerjasama dengan LSM lokal di Sulawesi Tengah. Adapun NGO yang tidak memiliki izin penyaluran bantuan diakibatkan karena tidak melakukan *agency partners* dengan pemerintah, mendapat larangan dari pemerintah untuk melakukan bantuan kegiatan kemanusiaan di Sulawesi Tengah, seperti halnya *Urban Search and Rescue Team* (USAR) yang aktivitasnya dihentikan dan dipulangkan kembali ke negara asal karena tidak memiliki izin yang telah diterbitkan oleh pemerintah (nasional.kompas.com, 2018). Sehingga pemberian bantuan kemanusiaan oleh Lembaga asing yang tidak melakukan kerjasama dengan pemerintah tidak dapat memberikan bantuan secara langsung kepada para korban bencana alam. Hal ini membatasi ruang lingkup bagi NGOs internasional dalam aksi kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan bagi para korban bencana.

Efektifitas penangana bantuan pasca bencana dapat dilihat pada kasus bencana 2004 di Aceh. Dalam masa tangap darurat pemerintah pusat dan daerah Bersama *stakeholder* (LSM, Internasional NGOs, swasta dalam negeri dan komunitas relawan) yang bertujuan meminimalisir jumlah korban untuk tidak bertambah. Usaha tersebut dilakukan melalui tindakan medis, evakuasi korban dan pemberian bantuan logistik. Sedangkan dalam pemberian bantuan logistik dikatakan mengalami hambatan yang disebabkan karena, minimnya alat transportasi, tenaga lapangan yang kurang, serta minimnya data, informasi dan komunikasi. Hal ini yang mengakibatkan jalannya program bantuan yang belum efektif (Mirza, 2008). Sedangkan John Telford menulis dalam

laporan *Tsunami Evaluation Coalition (TEC) Synthesis* dan laporan-laporan TEC lainnya, yang memeriksa respons internasional terhadap Tsunami 2004. Bahwa agensi-agensi internasional dikritik dalam laporan-laporan TEC karena membuat pilihan program tanpa memikirkan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.

Organisasi-organisasi internasional sering gagal dalam mencapai tujuan sederhana seperti memberikan informasi secara akurat, tepat waktu, dan lengkap kepada rakyat yang terkena bencana, memberikan janji palsu kepada rakyat yang terkena bencana, kemitraan palsu (yakni kesepakatan yang tak jauh berbeda dari sekedar melibatkan organisasi lokal sebagai pekerja lepas) merupakan contoh lainnya. Berbagai masalah lain yang diidentifikasi dalam evaluasi-evaluasi tematik TEC.

Praktik-praktik tersebut dapat ditelusuri ke akar penyebab berikut ini:

- a. terlalu sedikitnya legislasi internasional dan nasional yang mengatur kewajiban agensi internasional di negara yang terkena bencana;
- b. buruknya kapasitas, persiapan dan sarana dari banyak staf kemanusiaan internasional.
- c. mekanisme koordinasi yang dibangun oleh komunitas internasional tidak menyentuh lembaga-lembaga lokal, khususnya lembaga-lembaga yang bekerja di lokasi-lokasi terpencil.
- d. semua pertemuan dilakukan dalam bahasa Inggris, tanpa adanya terjemahan kedalam bahasa setempat. Tidak dapat dimengerti apa yang

Koordinasi kemanusiaan di Indonesia Dominasi penggunaan bahasa Inggris. (Daly, Feener, & Reid, p.37-40 2012).

Shanti Volunteer Association yang merupakan *non-government organization* dari Jepang yang ikut serta pada 20 Oktober 2018 dalam penyaluran bantuan terhadap korban bencana alam di Sulawesi Tengah. NGO yang dibentuk 1981 ini telah memiliki beberapa kantor cabang yang berlokasi di Jepang, Cambodia, Laos, Myanmar, Afganistan dan Nepal. Awalnya NGO ini berfokus pada bidang Pendidikan, akan tetapi dengan maraknya kasus krisis kemanusiaan yang terjadi NGO ini juga ikut serta dalam aksi kemanusiaan guna mengurangi penderitaan para korban. SVA ikut membantu ketika kekerasan kemanusiaan yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap masyarakat Rohingya yang mengakibatkan ratusan ribu masyarakat yang tinggal di kamp-kamp pengungsian, terdapat Sembilan kamp pengungsi Myanmar (Burma) (total area 53, 767.6 km²) yang diakui oleh pemerintah Thailand di dekat perbatasan sepanjang 2000 km antara Thailand dan Myanmar yang dibentuk oleh SVA, kamp ini terdiri dari 2 kamp Kareni dan 7 kamp Karen, dan SVA aktif di kamp-kamp pengungsi Karen. SVA juga menyediakan *food support* dan memberikan Pendidikan dan pelatihan bagi anak-anak yang berada di kamp-kamp pengungsi. SVA ikut terlibat dalam pemberian bantuan ketika bencana alam terjadi di Nepal tahun 2015 mereka memberikan bantuan yang berfokus pada korban perempuan dan anak, dimana mempunyai dua tahapan pemberian bantuan pertama yaitu *Disaster Management in Education* (Manajemen Bencana dalam Pendidikan mendukung total 91 sekolah dengan membangun Pusat Pembelajaran Sementara (TLC) “248 ruang kelas di 124

bangunan” dan kakus “di 34 bangunan”, memasang 14 tangki air, dan memasok alat tulis, peralatan bermain dan buku bergamban) dan disusul dengan *Woman and Child Protection Project* (membangun tempat perlindungan wanita dengan Child Friendly Space (CFS) bersama dengan toilet darurat di tujuh bangunan .

Dapat dilihat kinerja SVA diatas dalam pemberian bantuan kemanusiaan dan beberapa contoh kasus pemberian bantuan yang diberikan oleh organisasi internasional yang kurang efektif dalam pelaksanaanya program bantuannya. Mekanisme dalam menjalankan program pemberian bantuan kemanusiaan di Sulawesi Tengah, SVA telah memiliki program mendistribusi bantuan cepat tanggap yang pemberiannya berfokus pada wanita kepala rumah tangga, anak-anak, dan lansia. Akan tetapi pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan bahwa hanya sejumlah kecil staf internasional yang diizinkan di lapangan dan jangka waktu dalam pemberian bantuan (republika.co.id, 2018). Dalam permasalahan keterlambatan pemberian bantuan akibat peraturan yang dikeluarkan pemerintah dan pembatasan jumlah staf ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi program pemberian bantuan yang diberikan oleh SVA bagi para korban bencana alam di Sulawesi Tengah.

Melihat masalah yang dihadapi, SVA sebagai salah satu Internasional Non Government Organization bukan hanya memberikan bantuan pokok kepada masyarakat, namun SVA ikut terlibat dalam pemulihan masyarakat pasca bencana, khususnya untuk memberikan bantuan dan pemulihan terhadap wanita kepala rumah tangga, anak dan lansia, sehingga masyarakat dapat kembali pulih seperti sebelum terjadinya bencana. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik mengetahui kontribusi “Bantuan

Humanitarian Shanti Volunteer Assosiation dalam Penangana Pasca Bencana Alam 2018 di Sulawesi Tengah”.

B. Batasan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup masalah, maka penulis mengambil kontribusi bantuan aksi kemanusiaan di Sigi, dan Donggala pada tahun 2018 akibat bencana alam. Hal ini bertujuan untuk memfokuskan pada Shanti Volunteer Assosiation dan aksi humaniarian dalam penanganan pasca bencana alam di Sulawesi tengah.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana kontribusi Shanti Volunteer Assosiation dalam penanganan pasca bencana alam 2018 di Sulawesi tengah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui bagaimana kontribusi Shanti Volunteer Assosiation penanganan pasca bencana alam 2018 di Sulawesi tengah.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a) Memberikan informasi dan refrensi pengetahuan tentang peran shanti volunteer assosiation dan aksi humaniarian dalam penanganan pasca bencana alam di Sulawesi tengah.

- b) Menambah pembendaharaan referensi di Perpustakaan Perpustakaan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Bosowa Makassar.

E. Kerangka Konseptual

Kasus bencana alam yang dihadapi masyarakat Sulawesi Tengah yang menelan korban jiwa dan ratusan ribu pengungsi, yang membutuhkan bantuan kemanusiaan guna menunjang kebutuhan hidup dan meminimalisir dampak yang dapat diderita masyarakat pasca bencana alam yang terjadi di Sulawesi Tengah sehingga tidak ada lagi korban yang menderita setelah bencana terjadi. Bantuan kemanusiaan didefinisikan sebagai: “Tindakan asistensi, proteksi dan advokasi yang diambil atas dasar ketidakberpihakan, untuk menanggapi kebutuhan manusia yang timbul dari keadaan darurat politik yang kompleks dan marabahaya alami” (Good Humanitarian Donorship, 2003). Kesiapan menghadapi bencana, aktivitas pencegahan dan pemulihan, kesemuanya secara umum tercakup dalam istilah aksi kemanusiaan, yang kini juga menjangkau aktivitas non-darurat

Bantuan kemanusiaan dengan konsep humanitarian menurut (Kelly, 2009) “konsep humanitarian action dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang tercantum dalam konvensi-konvensi Jenewa 1949, yaitu: prinsip kemanusiaan (humanity), tidak memihak (impartiality), netral (neutrality), dan mandiri (independence). Dalam kondisi setelah bencana alam di Sulawesi Tengah dibutuhkan tindakan dalam penanggulangan pasca bencana alam, negara yang tertimpa bencana alam mempunyai kedaulatan utama dalam menanggulangnya. Apabila negara tersebut dalam kondisi tidak mampu

(*unable*) menaggulangnya atau tidak mau (*unwilling*) maka negara diharapkan tidak menolak bantuan kemanusiaan internasional yang ditawarkan.

Sedangkan menurut *The European Consensus* tentang *Humanitarian Aid* atau bantuan kemanusiaan dalam aksi kemanusiaan “*untuk memberikan tanggap darurat berbasis kebutuhan yang bertujuan melindungi kehidupan, mencegah dan mengurangi penderitaan manusia dan menjaga martabat manusia di mana pun kebutuhan muncul jika pemerintah dan aktor lokal kewalahan, tidak mampu atau tidak mau bertindak*” (Statement, 2007). Dalam melakukan pemberian bantuan kemanusiaan keputusan ini bertujuan untuk merespon aktor kemanusiaan dalam pemberian bantuan seperti memberikan bantuan, pertolongan dan perlindungan, mengamankan akses, meningkatkan kesiapsiagaan bencana dan pengurangan risiko bencana (Statement, 2007). Dalam efektivitas bantuan kemanusiaan di Sulawesi Tengah dapat dijalankan lebih baik. Langkah-langkah ini dapat digunakan oleh SVA dalam pemberian bantuan guna memulihkan penderitaan yang dihadapi masyarakat di Sulawesi Tengah.

Pada setiap aksi-aksi kemanusiaan, organisasi kemanusiaan memiliki kemampuan untuk mendapatkan dan mempertahankan akses ke semua penduduk, khususnya bagi kelompok rentan. Prinsip bantuan kemanusiaan seharusnya dapat diterapkan oleh organisasi SVA dalam pemberian bantuan kemanusiaan di Sulawesi Tengah guna menunjang efektifitas dari bantuan yang diberikan. Penderitaan manusia harus ditangani di mana pun ditemukan. Maksud kerja kemanusiaan adalah melindungi kehidupan dan kesehatan serta menjamin penghargaan terhadap manusia (Core Humanitarian Standar on Quality and Accountability, 2014). Penderitaan yang

dialami oleh korban harus diatasi ketika ditemukan, dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, para pengungsi dan orang tua.

Untuk mengaitkan konsep dalam penanganan pasca bencana maka konsep yang digunakan adalah Manajemen Bencana berangkat dari keterbatasan manusia dalam memprediksi dan menghadapi bencana. Manajemen Bencana dapat didefinisikan sebagai *“the organization and management of resources and responsibilities for dealing with all humanitarian aspects of emergencies, in particular preparedness, response and recovery in order to lessen the impact of disasters”*(ifrc.org). Dalam kejadian bencana alam Sulawesi Tengah yang dapat digolongkan sebagai keadaan darurat yang membutuhkan perhatian dari pemerintah, kalangan akademisi, sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat bahkan dunia internasional. Perlunya upaya bantuan dalam operasi bantuan kemanusiaan bagi para korban bencana dalam sebuah upaya *disaster response and recovery* atau upaya respons dan pemulihan bencana. Upaya respons dan pemulihan bencana merupakan aktivitas bantuan bencana pada tahap tanggap darurat serta pemulihan akibat bencana (Mendonca *et al.*, 2007). Manajemen bencana merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana. Manajemen bencana bertujuan untuk (1) mencegah kehilangan jiwa; (2) mengurangi penderitaan manusia; (3) memberi informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai risiko, serta (4) mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomis (FEMA,

2000). Menejemet bencana dapat digunakan SVA untuk mengoptimalkan program bantuan yang akan dilakukan di Sulawesi Tengah dalam mekanisme kinerja dan tahapan-tahapam dalma proses SVA memberikan program bantuan terhdap para korban.

Semua bentuk upaya untuk merespon dan pemulihan bencana pasti akan melibatkan hubungan antara pemerintah dan organisasi-organisasi pemberi bantuan terutama SVA yang melakukan kerjasama dengan organisasi lokal. Katoch (2006) mengemukakan bahwa pemerintah berperan utama dalam penanganan bencana alam serta bekerja sama dengan organisasi- organisasi bantuan kemanusiaan. Seperti halnya kejadian bencana alam Sulawesi Tengah dimana pemerintah daerah tidak mungkin mampu merespons segala aspek dalam upaya pemulihan bencana sendirian. Upaya pemulihan bencana dilakukan oleh pemerintah dan dibantu oleh NGO atau LSM, perusahaan-perusahaan, lembaga dan institusi swasta, lembaga akademis, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat dari daerah lain (Talentino, 2007). SVA melakukan Kerja sama dengan KPKPST dalam sumber daya manusia, teknologi dan prosedur tersebut secara kolektif diidentifikasi sebagai disasters management system atau sistem manajemen bencana.

Untuk memahai lebih dalam efektifitas bantuan kemanusiaan dan langkah-langkah apa saja jang digunakan dalam penanganan pasca bencana di Sulawesi Tengah maka penulis menggunakan *Disaster Risk Reduction, The International Strategy for Disaster Reduction (ISDR)* mendefinisikan sebagai keputusan dan tindakan yang diambil setelah bencana dengan tujuan untuk memulihkan atau meningkatkan kondisi

kehidupan pra-bencana dari masyarakat yang dilanda bencana, sambil mendorong dan memfasilitasi penyesuaian yang diperlukan untuk mengurangi risiko bencana (ISDR, 2009). Terdapat beberapa fase dalam pemulihan pasca bencana. Berdasarkan standar penanganan pasca bencana, maka di lokasi bencana umumnya dilakukan tindakan evakuasi, rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap para korban terdampak bencana sehingga program bantuan yang dijalankan SVA dapat dirasakan oleh masyarakat.



F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan di pakai dalam penulisan ini adalah kualitatif. Yang dinilai akan dapat menjelaskan upaya Bantuan Humanitarian Shanti Volunteer association dalam penanganan pasca bencana alam 2018 di Sulawesi tengah

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan data primer. Data primer adalah data yang berasal dari pengumpulan data melalui wawancara langsung, Observasi .

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam peneilitian ini yaitu: wawancara dengan pihak Shanti Volunteer Assosiattion SVA dan KPKPST,
2. observasi lapangan dan data lapangan,
3. telah pustaka (jurnal,artike,dan surat kabar) yang berkaitan dengan kasus pembahasan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis akan gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, dimana persoalan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada.

G. Rancangan dan Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian dan analisis penelitian ini akan disusun dalam karya tulis ilmiah (skripsi), dalam rancangan sistematika sebagai berikut:

1. Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batas masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua, tinjauan pustaka, berisi penelusuran dan literatur tentang konsep.
3. Bab ketiga, gambaran umum tentang profesi shanti volunteer association dalam aksi humanitarian.
4. Bab keempat, yaitu analisis penelitian tentang shanti volunteer association dan aksi humanitarian dalam penanganan pasca bencana alam 2018 di Sulawesi tengah.
5. Bab kelima, yaitu penutup berisi kesimpulan dan saran-saran

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Humanitarian Action

Dalam hal ini memahami konsep aksi kemanusiaan, maka perlu memahami gagasan dari aksi kemanusiaan ini lahir. Sepanjang sejarah manusia yang menganggap bahwa perang dan konflik, sebagai hal yang wajar di negara dan kehidupan manusia. Hal ini mengakibatkan maraknya kehancuran dan penderitaan bagi masyarakat sipil. Pasca Perang Dunia II, bencana kemanusiaan akibat konflik semakin menurun, dipihak lain justru bencana kemanusiaan yang diakibatkan oleh bencana alam semakin meningkat dengan dampak yang luar biasa besar, terutama pasca dekade 1990an. Bencana banjir, badai, gempa bumi, tsunami dan gunung meletus banyak terjadi dan menelan kerugian cukup besar, baik kerugian jiwa maupun materi (Buzan, 1991). Yang mendasari aksi kemanusiaan adalah beberapa prinsip utama hukum humaniter, khususnya aturan yang ditetapkan oleh konvensi Jenewa 1949. Meskipun tidak secara langsung menangani organisasi bantuan, mereka memberikan beberapa pembenaran untuk pemberian bantuan kepada warga sipil dan militer yang terluka dan memaksakan kepada negara-negara yang meratifikasi kewajiban untuk mengizinkan bantuan diberikan (Mackintosh, 2000).

Sehingga The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) mendefinisikan aksi kemanusiaan terdiri dari bantuan, perlindungan dan advokasi dalam menanggapi kebutuhan kemanusiaan yang dihasilkan dari bahaya alam,

konflik bersenjata atau penyebab lainnya, atau kesiapsiagaan tanggap darurat (IASC, p8,2015). Oleh karena itu aksi kemanusiaan bertujuan untuk menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan dan menjaga martabat manusia selama dan sesudah bencana yang disebabkan oleh manusia maupun bencana yang disebabkan oleh alam, serta untuk mencegah dan bersiap ketika situasi serupa terjadi. Sehingga aksi kemanusiaan bertujuan untuk mengurangi derita yang dialami para orang-orang yang tidak mendapatkan akses bagi keberlanjutan hidup mereka.

Aksi kemanusiaan juga diatur oleh hukum kemanusiaan internasional dan hukum hak asasi manusia yang mengikat dan tidak mengikat. Aksi kemanusiaan didasarkan pada premis bahwa penderitaan manusia harus dicegah dan diringankan di mana pun itu terjadi sehingga dalam melaksanakan aksi kemanusiaan organisasi harus mengikuti prinsip-prinsip dasar yang terdiri dari empat poin yaitu (IASC, p8,2015):

- a. *Humanity*: Penderitaan manusia harus diatasi di mana pun berada. Aksi kemanusiaan bertujuan untuk melindungi nyawa dan kesehatan dan memastikan adanya penghargaan terhadap umat manusia;
- b. *Impartiality*: Aksi kemanusiaan harus dijalankan atas dasar kebutuhan semata tanpa memperdulikan kebangsaan, ras, gender, keyakinan keagamaan, kelas atau pandangan politis;
- c. *neutrality*: Para aktor kemanusiaan tidak boleh berpihak dalam perselisihan/ peperangan atau terlibat dalam kontroversi politik, ras, agama atau ideologi;
- d. *independence*: Aksi kemanusiaan harus bersifat otonom dari tujuan politis, ekonomi, militer atau tujuan-tujuan lain yang mungkin dimiliki oleh aktor-

aktor di wilayah dimana aksi kemanusiaan sedang dilaksanakan (GDH, 2003).

Tujuan utama aksi kemanusiaan internasional adalah untuk mendukung upaya-upaya nasional dalam melindungi nyawa, penghidupan, dan martabat orang-orang yang membutuhkan. Untuk melihat kemanusiaan prinsip-prinsip ini sangat diperlukan bagi mereka para pekerja aksi kemanusiaan, untuk menerima kepercayaan, diterima, dan mendapatkan akses kepada orang yang membutuhkan. Sebagai titik awal, maka, sektor ini membutuhkan kejujuran dan transparansi yang lebih besar tentang penyimpangan dari prinsip-prinsip tersebut (HERE-Geneva, 2015). Hal ini bertujuan untuk melindungi prinsip-prinsip dan meningkatkan kinerja pekerja aksi kemanusiaan, sehingga ketika terjadi bencana tidak hanya memberikan bantuan tapi dapat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada.

Perlindungan dalam Konteks Aksi Kemanusiaan menemukan bahwa perspektif di antara para pekerja kemanusiaan adalah bahwa mereka tidak memiliki peran untuk dimainkan dalam melawan perilaku kasar atau kekerasan bahkan ketika politik dan militer. strategi dan taktik merupakan ancaman terbesar bagi kehidupan (Niland et al., 2015: 27). Dalam bentuknya yang paling sederhana, aksi kemanusiaan berupaya melindungi kehidupan manusia dan memastikan penghormatan terhadap martabat manusia (ICRC, 1996). adopsi mendesak untuk sampai pada pendekatan aksi kemanusiaan antarlain:

- a. Membangun hubungan antar sektor tematik yang menghasilkan pendekatan pemrograman yang lebih komprehensif. Rencana Pengungsian dan Ketahanan Regional Suriah, yang meleburkan respons langsung terhadap kebutuhan mendesak para pengungsi dengan rencana aksi yang jauh lebih tajam untuk menangani masalah-masalah seperti kohesi sosial dan pengelolaan sumber daya alam (Scott, 2015).
- b. Eschews mendefinisikan *the effectiveness of its work by short-term project goals*, dengan tidak cukup memperhatikan potensinya untuk membangun atau mengurangi konsekuensi negatif untuk upaya pembangunan, dan merangkul sentralitas *'smart' relief*, yang mencerminkan penyebab struktural krisis dan yang mencari peluang untuk memanfaatkan kapasitas lokal (Hilhorst and Pereboom, 2016: 98)
- c. *The ICRC's policy of improving the future-friendliness of its response to crisis*: pengembangan pendekatan multi-tahun, memperdalam keterlibatan dengan populasi yang terkena dampak dan mengamankan pembangunan terhadap kemunduran yang disebabkan oleh konflik atau bencana (ICRC, 2017: 6).

A.1 Humanitarian Aids

Bantuan yang disalurkan disebut dengan *Humanitarian Aids* atau bantuan kemanusiaan, dan biasanya disalurkan oleh pemerintah suatu Negara, individu, NGO, organisasi multilateral, organisasi domestik dan perusahaan privat

(globalhumanitarianassistance.org). Sementara itu, *humanitarian workers* atau juga sering disebut dengan *aid worker* atau *humanitarian aid worker* adalah anggota dari agensi kemanusiaan PBB, badan kemanusiaan Palang dan Bulan Sabit Merah serta NGO yang memiliki tujuan kemanusiaan (AWSO, p.1, 2011). Pekerja ini meliputi staff atau pekerja nasional dari organisasi internasional dan pekerja dari organisasi lokal atau nasional (AWSO, p.8, 2011). Tipe pekerjaan pekerja kemanusiaan ini juga sangatlah beragam, yaitu Middle Manager (pemimpin tim, manajer proyek), pekerja non profesional (para pekerja kantor, sopir, dan lain sebagainya) dan sukarelawan yang akan bertugas mengeksekusi pendistribusian bantuan (MSHW, p.12, 2012).

Tujuan *Humanitarian Aid*:

- a. Memberikan bantuan, pertolongan dan perlindungan: Operasi untuk menyelamatkan dan melestarikan kehidupan dalam krisis kemanusiaan atau akibat langsungnya.
- b. Mengamankan Akses: Tindakan yang bertujuan memfasilitasi atau mendapatkan akses ke orang yang membutuhkan dan aliran bantuan yang bebas sebagai menjangkau orang yang rentan adalah penting untuk memberikan perlindungan dan bantuan yang memadai dalam konteks bencana alam dan keadaan darurat yang kompleks serta dalam peningkatan kapasitas lokal untuk mendukung kebutuhan kemanusiaan.
- c. Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana: Operasi yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas para aktor lokal untuk mencegah dan mengurangi dampak bencana dan memungkinkan

masyarakat untuk meningkatkan ketahanan mereka terhadap keadaan darurat (Statement, 2007).

Dalam praksis bantuan darurat, tujuannya berpusat pada menyelamatkan nyawa, mengurangi penderitaan dan melindungi martabat manusia Prinsip-prinsip kemanusiaan dan ketidak berpihakan memberikan panduan. Kemanusiaan memfokuskan aksi kemanusiaan pada urgensi kebutuhan mendesak orang, bukan kebutuhan suatu sistem, Untuk mengatasi ketidakcocokan mencolok antara cara dan tujuan bahwa mereka yang paling membutuhkan, humanitarian memiliki prinsip imparsialitas. Selain non-diskriminasi dalam pengiriman bantuan. Salah satu dari lima Komitmen Inti KTT Kemanusiaan Dunia menyerukan tindakan kemanusiaan untuk tidak meninggalkan siapa pun. menurut Jean Pictet bahwa, ketidak berpihakan memastikan bahwa distribusi bantuan '*dipandu sepenuhnya oleh kebutuhan mereka, dan untuk memberikan prioritas pada kasus-kasus krisis yang paling mendesak*' (Pictet, 1979).

A.1.1 Hal-hal yang dilakukan dalam pemberian bantuan kemanusiaan

Analisis kontemporer dari sektor kemanusiaan formal secara konsisten tidak baik. Banyak yang sampai pada kesimpulan bahwa, sistem kemanusiaan yang saat ini dibentuk tidak sesuai dengan tujuannya Hasilnya adalah ketidak cocokan antara aspirasi dan hasil yang dapat dicapai (Bennett, 2016: 4). Mempertimbangkan ruang lingkup ini, seseorang dapat mengklasifikasikan tindakan kemanusiaan dalam tiga kategori, mulai dari yang sempit hingga definisi yang luas tentang kemanusiaan.:

- a. aksi kemanusiaan yang didefinisikan secara sempit berfokus pada 'bantuan' atau penyediaan kebutuhan dasar - kategori ini cenderung bersifat jangka pendek dan beroperasi segera setelah krisis kemanusiaan;
- b. dalam ruang lingkup yang lebih luas, konsep bantuan kemanusiaan tidak hanya terdiri dari tanggap darurat langsung tetapi juga kegiatan yang bertujuan merehabilitasi populasi dan wilayah yang terkena bencana, untuk membuat situasinya dapat dihuni kembali, untuk mulai bersiap untuk kembali ke keadaan normal.
- c. dalam arti luas aksi kemanusiaan mencakup semua kegiatan yang berada dalam lingkup menghubungkan bantuan, rehabilitasi dan rekonstruksi / pembangunan.

Konsep aksi kemanusiaan ini memenuhi semua kriteria bantuan dan rehabilitasi tetapi juga memberikan masukan ke dalam proses merekonstruksi masyarakat yang terkena bencana yang bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang.

A.1.1.1 Cultural Awareness

Aid organizations and workers harus menyadari satu masalah penting lainnya: aspek budaya masyarakat dan lingkungan yang terkena dampak. Aid organizations and workers harus menyadari bahwa tindakan yang dapat diterima di masyarakat mereka mungkin tidak dapat diterima di negara lain. Kontak pertama dengan populasi yang terkena dampak dan otoritasnya dapat menjadi faktor penentu dalam hubungan antara organisasi bantuan dan populasi. Oleh karena itu, para pekerja kemanusiaan harus

memastikan bahwa mereka berperilaku dengan cara yang dapat diterima secara budaya. Menghormati kode budaya sopan santun sering kali merupakan hal yang rumit. Ada 10 perbedaan yang harus dipertimbangkan oleh para pelaku kemanusiaan ketika menganalisis perbedaan budaya:

- a. Hubungan dengan Otoritas: Seberapa jauh kekuasaan dan otoritas dari orang-orang yang terkena dampak?
- b. Hubungan Pria-Wanita: Apa peran gender dan siapa yang memutuskan?
- c. Individualisme dan Kolektivisme: Apakah masyarakat lebih berorientasi secara kolektif atau individual?
- d. Toleransi Ambiguitas: Apakah semuanya harus jelas sejak awal aksi?
- e. Menghargai Aturan: Apakah kita perlu menaatinya atau apakah zona abu-abu ditoleransi?
- f. Waktu: Bagaimana pengertian waktu dirasakan?
- g. Ruang dan Tempat: Apakah publik atau pribadi? Apakah ini dapat diakses oleh kedua jenis kelamin?
- h. Komunikasi Verbal dan Non-Verbal: Apa yang bisa dikatakan? Hal-hal apa yang harus tetap tidak diucapkan?
- i. Sales Pitch: Seberapa berhasrat saya untuk menjadi "tenaga penjualan"?
- j. Tawar-menawar: Siapa yang menetapkan harga pertama, vendor atau pembeli (penawaran)? (Griffoli& Picot, 2004).

Apa yang diterima dalam satu budaya mungkin tidak sopan di budaya masyarakat. Ada banyak indikator dan praktik terbaik “dos and don’ts”, tetapi para pekerja kemanusiaan tidak perlu takut untuk meminta bimbingan staf lokal di organisasi mereka.

A.1.1.2 The “Do No Harm” Principle

Anderson menulis, "*aid given during conflict cannot remain separate from that conflict*". Ini berlaku untuk bencana dan cara bantuan ini mempengaruhi pasca bencana dan populasi yang terkena dampak (Anderson,1999:36). Hal ini merupakan titik awal yang harus diakui oleh *aid organizations* dan *workers*, tidak peduli seberapa polos tindakan atau bantuan yang muncul.

aid organizations dan *workers* Tidak mungkin membuat keputusan tergesa-gesa dan juga menganalisisnya sepenuhnya, mengukur dampaknya dan hasil yang diharapkan. Buku pegangan, standar, pedoman, dan pengetahuan kelembagaan dapat membantu lembaga mengetahui bagaimana bereaksi terhadap jenis bencana tertentu, tetapi *organizations* dan *workers* harus berhati-hati untuk menghindari kesalahan langkah dalam memberikan bantuan, yang seringkali disebabkan oleh kurangnya analisis.

aid organizations dan *workers* harus mengklarifikasi beberapa pertanyaan penting:

- a. How will the aid be distributed and why?
- b. Who will distribute the aid and why?
- c. Who will receive the aid and why?

- d. What will the aid consist of and why?
- e. From where will it be distributed and why?

A.1.1.3 Komitmen dan Kriteria Kualitas

Standar kemanusiaan menggambarkan bagaimana proses dan pendekatan yang diambil selama respons kemanusiaan sangat mendasar untuk respons yang efektif. Fokus pada kapasitas dan partisipasi aktif dari mereka yang terkena dampak bencana atau konflik, analisis komprehensif dan pemahaman tentang kebutuhan dan konteks, koordinasi yang efektif antar lembaga, komitmen untuk terus meningkatkan kinerja, dan pekerja bantuan yang terampil dan didukung dengan baik semuanya penting dalam rangka untuk mencapai standar teknis. Dalam pemberian bantuan kemanusiaan organisasi kemanusiaan dapat menggunakan standar yang telah dikeluarkan oleh *Core Humanitarian Standard* untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas bantuan yang diberikan sebagai berikut:



Sumber: Core Humanitarian Standar on Quality and Accountability

1. Komunitas dan warga terdampak krisis menerima bantuan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kriteria kualitas: Respons kemanusiaan harus sesuai dan relevan.
2. Komunitas dan warga terdampak krisis mempunyai akses terhadap bantuan kemanusiaan yang mereka perlukan pada waktu yang tepat. Kriteria kualitas: Respons kemanusiaan harus efektif dan tepat waktu.
3. Komunitas dan warga terdampak krisis bebas dari dampak negatif dan akan menjadi lebih siap, lebih tangguh dan kurang berisiko setelah menerima aksi kemanusiaan. Kriteria kualitas: Respons kemanusiaan harus mendorong peningkatan kapasitas lokal dan tidak menimbulkan akibat buruk.
4. Komunitas dan warga terdampak krisis mengetahui hak-hak mereka yang dijamin oleh hukum, mempunyai akses terhadap informasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada diri mereka. Kriteria kualitas: Respons kemanusiaan berdasarkan pada komunikasi, partisipasi dan umpan balik.
5. Komunitas dan warga terdampak krisis mempunyai akses terhadap mekanisme pengaduan yang aman dan responsif. Kriteria kualitas: Pengaduan disambut baik dan ditangani.
6. Komunitas dan warga terdampak krisis menerima bantuan yang terkoordinasi dan saling melengkapi. Kriteria kualitas: Respons kemanusiaan harus terkoordinasi dan saling melengkapi.

7. Komunitas dan warga terdampak krisis dapat mengharapkan penyaluran bantuan yang lebih baik, karena organisasi belajar dari pengalaman dan refleksi. Kriteria kualitas: Pekerja kemanusiaan senantiasa belajar dan meningkatkan diri.
8. Komunitas dan warga terdampak krisis menerima bantuan yang mereka butuhkan dari staf dan relawan yang kompeten dan dikelola dengan baik. Kriteria kualitas: Staf didukung dalam melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan diperlakukan dengan adil dan setara.
9. Komunitas dan warga terdampak krisis dapat mengharapkan bahwa organisasi yang membantu mereka mengelola sumber-sumber daya dengan efektif, efisien dan etis. Kriteria kualitas: Sumber-sumber daya dikelola dan digunakan dengan bertanggungjawab sesuai peruntukannya.

CHS menempatkan komunitas dan warga terdampak krisis pada pusat aksi kemanusiaan dan mendorong penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. CHS mendukung hak atas hidup bermartabat, dan hak atas perlindungan dan keamanan yang telah ditetapkan oleh Hukum Internasional, termasuk di dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (Core Humanitarian Standar on Quality and Accountability, 2014). Dimana melalui panduan ini SVA ataupun organisasi lain yang berperana dalam memberikan bantuan kemanusiaan dapat mengefektifkan kerja mereka.

B. Manajemen Bencana

Bencana telah mempengaruhi manusia sebagai tanggapan yang dilakukan individu dan masyarakat telah melakukan beberapa upaya untuk mengurangi dampak yang diakibatkan bencana, mengembangkan langkah-langkah untuk mengatasi dampak awal serta respons pasca bencana dan kebutuhan pemulihan. Terlepas dari pendekatan yang digunakan, semua upaya ini memiliki tujuan yang sama yaitu manajemen bencana.

Bencana dapat didefinisikan sebagai gangguan ekologis yang luar biasa yang terjadi pada skala yang cukup untuk membutuhkan bantuan dari luar. Manajemen bencana adalah istilah kolektif yang mencakup semua aspek perencanaan untuk dan menanggapi keadaan darurat dan bencana, termasuk kegiatan sebelum dan sesudah bencana. Hal ini mengacu pada manajemen risiko dan konsekuensi dari suatu peristiwa (Chatterjee,2016).

Manajemen Bencana dapat didefinisikan sebagai organisasi dan manajemen sumber daya dan tanggung jawab untuk menangani semua aspek kemanusiaan dari keadaan darurat, khususnya kesiapsiagaan, respon dan pemulihan untuk mengurangi dampak bencana (ifrc.org).

Pada 11 Desember 1987 the United Nations General Assembly declared the 1990s sebagai “*International Decade for Natural Disaster Reduction*” (IDNDR). Tindakan ini diambil untuk mempromosikan upaya terkoordinasi internasional untuk mengurangi kerugian materi dan gangguan sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh bencana alam, terutama di negara-negara berkembang, melalui pembangunan kapasitas.

Pada 22 Desember 1989, melalui Resolusi PBB 44/236, Majelis Umum menetapkan tujuan yang ingin mereka capai (United Nations, 1989).

Pada Mei 1994, negara-negara anggota PBB bertemu untuk membahas Natural Disaster Reduction di Yokohama, Jepang, untuk menilai kemajuan yang dicapai oleh IDNDR. Pada pertemuan ini, mereka mengembangkan Strategi dan Rencana Aksi Yokohama untuk Dunia yang Lebih Aman. Negara-negara anggota yang berpartisipasi menerima prinsip-prinsip untuk diterapkan pada manajemen bencana di negara mereka sendiri. Prinsip kesepuluh dan terakhir merumuskan persyaratan bahwa pemerintah masing-masing negara bertanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari konsekuensi bencana (ISDR 1994).

The International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) diciptakan untuk membantu menciptakan negara, organisasi, dan komunitas yang “tangguh terhadap bencana” dengan mendukung gagasan bahwa pengurangan bencana harus sepenuhnya terkait dengan pembangunan. ISDR berupaya mengurangi korban manusia, sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang menjangkiti negara-negara kaya dan miskin. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, ISDR mempromosikan empat tujuan sebagai alat untuk mencapai “*disaster reduction for all*”:

- a. *Increase public awareness about risk, vulnerability, and disaster reduction.*
- b. *Obtain commitment from public authorities to implement disaster reduction policies and actions.*

- c. *Stimulate interdisciplinary and intersectoral partnerships, including the expansion of riskreduction networks.*
- d. *Improve scientific knowledge about disaster reduction.* (UNISDR,2001).

Sebagai salah satu tindak lanjut dalam menghadapi perubahan paradigma manajemen bencana, pada bulan Januari tahun 2005 di Kobe-Jepang, diselenggarakan Konferensi Pengurangan Bencana Dunia (World Conference on Disaster Reduction) yang menghasilkan beberapa substansi dasar dalam mengurangi kerugian akibat bencana, baik kerugian jiwa, sosial, ekonomi dan lingkungan.

Sedangkan dalam Disaster Risk Reduction dapat didefinisikan sebagai Tindakan yang diambil untuk mengurangi risiko bencana dan dampak buruk dari bahaya alam, melalui upaya sistematis untuk menganalisis dan mengelola penyebab bencana, termasuk melalui penghindaran bahaya, mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi terhadap bahaya, dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi peristiwa buruk (EUPRHA, 2013). Pengurangan Risiko Bencana sangat dipengaruhi oleh penelitian masa pada berbagai malapetaka di masa lalu. Konsep Pengurangan Risiko bencana berkembang dari paradigma penanggulangan bencana sebelumnya.

Penanggulangan bencana atau yang sering didengar dengan manajemen bencana (disaster management) adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi (BKNPB, 2007). *disaster management* berarti proses

perencanaan, pengorganisasian, koordinasi dan implementasi yang berkesinambungan dan terpadu yang diperlukan atau berguna untuk:

- a. Pencegahan bahaya atau ancaman bencana apa pun;
- b. Mitigasi atau pengurangan risiko bencana atau keparahan atau konsekuensinya;
- c. Capacity-building;
- d. Kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana apa pun;
- e. Respons segera terhadap segala situasi bencana atau bencana yang mengancam;
- f. Menilai tingkat keparahan atau besarnya dampak dari setiap bencana; evakuasi, penyelamatan dan bantuan;
- g. Rehabilitasi dan rekonstruksi;

Dalam praktiknya terdapat faktor-faktor yang saling terkait antara satu dan yang lain. Hal ini yang mengakibatkan manajemen bencana yang komprehensif didasarkan pada empat komponen yang berbeda: *mitigation, preparedness, response, and recovery*. manajemen bencana yang efektif menggunakan setiap komponen seperti berikut:

- a. *Mitigation*: mitigasi melibatkan pengurangan atau penghapusan kemungkinan atau konsekuensi dari suatu bahaya, atau keduanya. Mitigasi berupaya untuk "mengobati" bahaya sedemikian rupa sehingga berdampak pada masyarakat pada tingkat yang lebih rendah.

- b. *Preparedness*: melibatkan memperlengkapi orang-orang yang mungkin terkena dampak bencana atau yang mungkin dapat membantu mereka yang terkena dampak dengan alat untuk meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup dan untuk meminimalkan kerugian finansial dan kerugian lainnya.
- c. *Response*: melibatkan tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak bencana yang telah terjadi atau sedang terjadi, untuk mencegah penderitaan lebih lanjut, kerugian finansial, atau kombinasi keduanya. Relief, istilah yang biasa digunakan dalam manajemen bencana internasional, adalah salah satu komponen respons.
- d. *Recovery*: melibatkan pengembalian kehidupan para korban kembali ke keadaan normal setelah terdampak dari bencana. Fase pemulihan umumnya dimulai setelah respons berakhir, dan dapat bertahan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun sesudahnya.

semua faktor ini saling terkait dan dilakukan sampai tingkat tertentu sebelum, selama, dan setelah bencana. Bencana cenderung ada dalam sebuah kontinum, dari pemulihan satu ke pemulihan yang lain. Sementara respons sering digambarkan sebagai tindakan setelah dampak bencana, tidak jarang respons aktual dimulai jauh sebelum bencana benar-benar terjadi (Alexander, 2002).

B.1 Tahapan dan Kegiatan dalam Mengelola Manajemen Bencana

Dalam melaksanakan penanggulangan bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, tahap tanggap darurat, dan tahap pasca bencana (BNPB, 2008). Tahapan-tahapan yang dilakukan untuk meminimalkan angka kematian, luka-luka dan kerusakan yang diakibatkan bencana, dan untuk memastikan bahwa layanan penyelamatan, bantuan darurat, rehabilitasi, dan lainnya dapat dilakukan setelah terjadi bencana (OCHA, n.d). manajemen bencana yang efektif tergantung pada implementasi dari serangkaian tindakan yang direncanakan dengan hati-hati. Emergency Relief segera diberikan kepada para korban krisis dan konflik kekerasan. Sebagian besar operasi bantuan dimulai dengan pemberitahuan singkat dan memiliki periode implementasi yang singkat tujuan utama bantuan darurat adalah untuk menyelamatkan jiwa (GHD, 2008). Melalui tahapan tersebut pemberi bantuan kemanusiaan dapat mengambil tindak lanjut untuk program yang akan dijalankan melalui tindakan setelah bencana terjadi dan pemulihan setelah bencana.

B.2 Post Disaster Respon

Setelah bencana terjadi dan diakui oleh pemerintah, maka upaya respon terhadap bencana dapat dilakukan. Orang-orang yang terkena dampak menjadi orang pertama yang mengetahui bahwa suatu bahaya telah melanda dan suatu peristiwa bencana sedang berlangsung, terutama dengan bencana yang timbul. Media sosial juga memainkan peran penting dalam meningkatkan pengumpulan informasi dan berfungsi sebagai alat untuk *response* dan *recovery* (Gundecha and Liu 2012). Sejauh ini respons

adalah yang paling kompleks dari empat fungsi manajemen darurat, seperti yang dilakukan selama periode tekanan yang sangat tinggi, dalam lingkungan yang sangat terbatas waktu, dan dengan informasi yang terbatas.

Begitu respons bencana dimulai, prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa. Kegiatan ini, yang meliputi pencarian dan penyelamatan, pertolongan pertama, dan evakuasi, dapat berlanjut selama berhari-hari atau berminggu-minggu, tergantung pada jenis dan tingkat keparahan bencana. Ketika sumber daya dimobilisasi, fungsi tambahan akan ditambahkan ke daftar dalam prioritas yang semakin meningkat, termasuk:

- | | |
|-----------------------|--|
| a. Disaster assessmen | e. Perawatan dampak bahaya yang tersisa |
| b. Air dan makanan | f. Shelter |
| c. Sanitasi | g. Keamanan |
| d. Layanan sosial | h. Dilanjutkannya kegiatan pemerintahan. |

Sesegera mungkin setelah bencana dimulai, pejabat tanggap harus mulai mengumpulkan data, yang kemudian diformulasikan menjadi informasi untuk memfasilitasi respons. Responden harus dapat mengetahui pada waktu tertentu atau pada interval pendek apa yang terjadi, di mana itu terjadi, apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan sumber daya apa yang tersedia.

B.2.1 Emergency

Peristiwa bahaya, terlepas dari apakah itu berubah menjadi bencana, adalah keadaan darurat. Mereka adalah situasi di mana pemikiran sepersekian detik dari individu yang terlatih dan tidak terlatih harus mengatasi kondisi di luar kehidupan normal. Keadaan darurat berlanjut sampai kebutuhan luar biasa ini berhenti dan bahaya terhadap kehidupan dan properti tidak lagi bertahan.

Keadaan darurat terjadi dalam tiga fase, dengan aktivitas respons yang berbeda berlaku untuk masing-masing:

- a. Pre-hazard. Selama periode darurat ini, peristiwa bahaya akan datang dan bahkan mungkin tidak bisa dihindari. Pengakuan peristiwa bahaya yang akan datang mungkin ada atau tidak ada.
- b. The emergency: Efek bahaya sedang berlangsung. Periode ini dimulai ketika efek merusak pertama dimulai dan meluas hingga semua efek merusak yang terkait dengan bahaya dan semua bahaya sekunder tidak ada lagi. Ini dapat diukur dalam beberapa detik untuk beberapa bahaya, seperti sambaran petir atau gempa bumi. Namun, untuk yang lain, seperti banjir, topan, kebakaran hutan, dan kekeringan, fase ini dapat berlangsung berjam-jam, sehari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan bertahun-tahun. Selama waktu ini, responden menjawab kebutuhan orang dan properti serta dampak bahaya.

c. Post emergency: Efek bahaya telah berhenti. Selama fase terakhir dari keadaan darurat ini, bahaya telah mengerahkan semua pengaruhnya, dan kerusakan langsung lebih lanjut diperkirakan dapat diabaikan. Responden tidak lagi menangani dampak bahaya, tetapi sebaliknya mendedikasikan upaya mereka untuk menangani kebutuhan para korban, mengelola orang mati, dan memastikan keamanan struktur dan lingkungan. Keadaan darurat masih ada dan situasinya masih berpotensi memburuk, tetapi bahaya atau bahaya yang memicu keadaan darurat tidak lagi ada.

1. Disaster assessment

Disaster Assessment dapat digunakan untuk membantu Tim Penilai dalam merencanakan, memformat, dan melakukan penilaian awal yang lengkap. Proses pengumpulan data ini, yang disebut penilaian bencana, meningkatkan kesulitan dan kompleksitas dengan ukuran dan cakupan bencana. Upaya penilaian bencana dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori umum, ditentukan oleh jenis data yang mereka cari:

a) Penilaian situasi.

Penilaian ini, juga disebut penilaian kerusakan, berupaya menentukan apa yang telah terjadi sebagai akibat dari bahaya. Penilaian situasi dapat membantu menentukan ruang lingkup geografis bencana, dan bagaimana hal itu mempengaruhi orang dan

struktur. Pada dasarnya, ini adalah ukuran dari konsekuensi bahaya. Data yang dicari dapat meliputi:

1. Area yang terkena dampak bencana (lokasi dan ukuran — dapat diplot ke peta dasar atau dijelaskan dengan kata-kata)
2. Jumlah orang yang terkena bencana
3. Jumlah yang terluka (mkmorbiditas) dan terbunuh (kematian)
4. Jenis cedera dan penyakit
5. Deskripsi karakteristik dan kondisi yang terkena dampak
6. Deskripsi situasi medis, kesehatan, gizi, air, dan sanitasi
7. Bahaya yang sedang terjadi atau yang muncul serta dampak bahaya
8. Kerusakan infrastruktur dan fasilitas penting, Kerusakan bangunan tempat tinggal dan komersial, Kerusakan sistem pertanian dan distribusi makanan, Kerusakan status ekonomi dan sosial daerah yang terkena dampak
9. Kerentanan populasi yang terkena dampak terhadap dampak bencana yang berkelanjutan atau terhadap bahaya terkait atau tidak terkait dan Upaya tanggapan saat ini sedang berlangsung.

b) Needs Assessment

Penilaian ini melibatkan pengumpulan data tentang layanan, sumber daya, dan bantuan lain yang diperlukan untuk mengatasi bencana. Ini digunakan untuk menentukan apa yang dibutuhkan untuk menyelamatkan dan mempertahankan kehidupan. Manajer bencana dapat menggunakan berbagai metode untuk melakukan penilaian ini, yang dapat mencakup:

1. Mengumpulkan informasi internal. Ini mencakup pengumpulan dan pelaporan semua informasi yang diketahui oleh staf atau afiliasi.
2. Inspeksi visual. Ini melibatkan penggunaan berbagai metode pengamatan, termasuk citra satelit, flyover udara, dan survei drive atau walkthrough.
3. Survei sampel. Informasi dikumpulkan dengan mewawancarai segmen representatif dari populasi yang terkena dampak.
4. Penilaian sektor kritis terperinci oleh spesialis. Para ahli di berbagai sektor, seperti transportasi, energi, kesehatan, dan pasokan air, melakukan survei yang ditargetkan untuk komponen infrastruktur yang dilatih khusus untuk mereka.
5. Wawancara yang sedang berlangsung. Orang-orang ditunjuk untuk mengumpulkan informasi secara berkelanjutan untuk mendukung pembaruan penilaian.
6. Mewawancarai informan. Anggota populasi yang terkena dampak yang diidentifikasi dapat memberikan informasi yang berguna mengenai situasi dan kebutuhan dihubungi secara berkala untuk melaporkan setiap temuan yang mungkin mereka miliki.

Stakeholder yang ditugaskan dalam manajemen insiden dan / atau koordinasi harus mengetahui dengan relatif percaya diri pada waktu tertentu. apa yang terjadi, di mana itu terjadi, apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan untuk mengatasi kebutuhan, dan sumber daya apa yang tersedia (OCHA, 2006).

B.2.2 Layann Sosial Darurat

Tekanan psikologis yang dihadapi para korban bencana sangat ekstrem. Dalam sekejap, seringkali dengan sedikit atau tanpa peringatan, seluruh kehidupan orang dicabut. Mereka mungkin kehilangan pasangan, anak-anak, orang tua, atau anggota keluarga atau teman lainnya. Mereka mungkin baru saja kehilangan tempat tinggal dan tidak memiliki pekerjaan, tanpa sarana yang jelas untuk menghidupi keluarga mereka.

Tanpa perawatan psikologis yang tepat, korban dapat masuk ke dalam depresi. Jika parah, depresi dapat memiliki konsekuensi ekstrem bagi korban bencana. Tingkat bunuh diri dan kekerasan cenderung meningkat beberapa kali lipat dari apa yang normal untuk populasi yang terkena dampak. Para korban depresi mungkin mulai mengabaikan tugas-tugas yang menjadi sandarannya untuk bertahan hidup, seperti memasak, mendapatkan makanan dan air, mandi, dan memelihara perawatan kesehatan yang memadai.

Layanan konseling yang tepat dapat membatasi efek ini. Mereka sama-sama terpapar dengan rasa sakit dan penderitaan emosional yang terkait dengan kematian, cedera, dan kehancuran seperti korban biasa, dan bahkan mungkin menjadi korban sendiri jika mereka berasal dari daerah yang terkena dampak. Responden sering memiliki tekanan psikologis tambahan berupa perasaan bertanggung jawab untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi masyarakat pada saat kedua tugas itu sangat menantang (PTSD, 2006).

B.2.3 Komando, kontrol, dan koordinasi

Ketika peristiwa bencana terjadi, ruang lingkup sistem yang menyusun manajemen sumber daya (manusia, keuangan, informasi, dan material) dan yang memandu tindakan para pemangku kepentingan (pemerintah, non-pemerintah, dan sektor swasta) melampaui apa yang dianggap normal atau rutin. Dengan menetapkan mekanisme komando, kontrol, dan koordinasi, manajer bencana jauh lebih mampu mempertahankan respons yang efektif dan konsisten.

Asumsi yang mendasari semua sistem komando dan kontrol adalah bahwa, meskipun secara taktis setiap kejadian mungkin agak berbeda, pendekatan manajemen keseluruhan harus selalu mengambil dari fungsi-fungsi utama yang sama. Ini termasuk:

- | | | |
|-------------|----------------|------------|
| 1. Perintah | 2. Logistik | 3. Operasi |
| 4. Keuangan | 5. Perencanaan | |

Pada 2005, PBB melakukan tinjauan terhadap upaya respons kemanusiaan global dan menemukan bahwa upaya koordinasi dapat ditingkatkan secara efektif melalui koordinasi yang lebih baik. Hasil dari tinjauan ini adalah rekomendasi bahwa badan-badan dan mitra-mitra PBB mengadopsi suatu sistem di mana upaya bantuan kemanusiaan dikelompokkan ke dalam tema-tema, dipandu oleh satu organisasi pemimpin yang diakui di antara komunitas responden. Setiap cluster terdiri dari berbagai sektor internasional, nasional, nonpemerintah, sektor swasta, dan organisasi lain yang beroperasi dalam tema tersebut. Kemudian, dua kelompok lagi terbentuk. Kesebelas kelompok tersebut meliputi:

1. Perlindungan
2. Koordinasi dan manajemen kamp
3. Sanitasi dan kebersihan air
4. Kesehatan
5. Tempat tinggal darurat
6. Nutrisi
7. Telekomunikasi darurat
8. Logistik
9. Pemulihan awal
10. Pendidikan
11. Pertanian (UNMIT, 2010.)

Respon adalah fungsi manajemen bencana yang paling terlihat di tingkat internasional. Namun, bagi banyak negara, terutama negara-negara miskin di dunia, tindakan yang terkait dengan respons bencana mungkin merupakan satu-satunya tindakan yang diambil untuk mengatasi bahaya penyebabnya. Ini adalah kemampuan lembaga-lembaga yang menanggapi untuk menjalankan fungsi ini, yang paling sering menentukan seberapa parah daerah yang terkena dampak, dan seberapa cepat ia dapat beralih ke pemulihan.

B.3 Disaster Recovery

Pemulihan bencana adalah fungsi manajemen darurat dimana negara, komunitas, keluarga, dan individu memperbaiki, merekonstruksi, atau mendapatkan kembali apa yang telah hilang sebagai akibat dari bencana dan, idealnya, mengurangi risiko bencana serupa di masa depan. Keputusan dan tindakan yang diambil setelah bencana dengan tujuan memulihkan atau memperbaiki kondisi kehidupan pra-bencana dari masyarakat yang dilanda bencana, sambil mendorong dan memfasilitasi penyesuaian yang

diperlukan untuk mengurangi risiko bencana (UNDP,2011). Pemulihan bencana juga merupakan yang paling sedikit dipelajari dan paling tidak terstruktur dari semua fungsi manajemen bencana.

Disaster recovery memiliki berbagai pendekatan dan prioritas berbeda di berbagai negara. Tidak mengherankan bahwa ada banyak pandangan dan interpretasi yang berbeda di berbagai negara, dengan perbedaan yang mencolok antara negara-negara yang memiliki ekonomi pasar maju, negara-negara dengan ekonomi transisi dan di negara-negara berkembang (Kaklauskas, Amaratunga, Haigh. 2009). Aktivitas yang paling terlihat terkait dengan fungsi pemulihan bermanifestasi pada waktu yang hampir bersamaan dengan tindakan tanggap darurat formal yang dinyatakan selesai. Setelah mengambil tindakan yang tepat untuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa, dan membatasi kerusakan lebih lanjut terhadap lingkungan dan properti, masyarakat harus menghadapi proses panjang untuk mendapatkan kembali apa yang hilang. Pemulihan membutuhkan perencanaan, koordinasi, dan pendanaan dalam jumlah besar, dan tidak berhasil kecuali itu mengurangi risiko dari bahaya atau bahaya yang memungkinkan terjadinya bencana. Tindakan dan kegiatan yang biasa dilakukan dalam periode pemulihan bencana meliputi:

1. Penilaian kerusakan dan kebutuhan
2. Dialog yang sedang berlangsung dengan publik
3. Penyediaan perumahan sementara, transisi, atau permanen
4. Pembongkaran dan pemindahan bangunan
5. Inspeksi dan perbaikan struktur yang rusak

6. Pembersihan, pemindahan, dan pembuangan puing-puing
7. Rehabilitasi infrastruktur
8. Program rehabilitasi budaya dan psikososial
9. Penciptaan peluang kerja dan dukungan ekonomi lainnya
10. Pembukaan kembali layanan sosial

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan aspek penting dalam setiap upaya pemulian, setiap kegiatan tersebut mempunyai peran yang sangat berarti bagi perbaikan kehidupan masyarakat pasca bencana.

B.3.1 Pemulihan Ekonomi

Bencana memberi tekanan pada ekonomi internasional, lokal, nasional, dan, dalam bencana terbesar. Sumber daya yang hilang, kehilangan produksi, kehilangan pekerjaan, kehilangan peluang bisnis, dan pengeluaran pemerintah yang besar semuanya berkontribusi pada penurunan ekonomi yang harus distabilkan dan kemudian dibalik. Masing-masing ekonomi lokal ditopang oleh seperangkat pendorong unik, yang mungkin termasuk pariwisata, pertambangan, manufaktur, kerajinan, jasa, pertanian, dan pendidikan. Masyarakat tumbuh di sekitar dan menjadi tergantung pada keberhasilan industri-industri ini, dan warga mereka memperoleh keterampilan dan pelatihan yang dirancang khusus untuk mereka. Industri pendukung dan jasa, seperti transportasi, komunikasi, hubungan masyarakat, dan pengiriman, akan berkembang di sekitar industri inti ini juga. Dengan demikian, pemulihan ekonomi harus dimulai dengan pemulihan pendorong ekonomi lokal.

Pemilihan bahan untuk mendukung rekonstruksi hampir selalu berdampak pada pasar lokal, walaupun ada sejumlah faktor yang menentukan apakah dampak ini positif atau negatif. Ketika bahan-bahan lokal dipilih, ekonomi lokal dapat memperoleh manfaat besar dari injeksi pendapatan. Namun, jika pasokan tidak dapat memenuhi permintaan, harga akan meroket, menyebabkan apa yang dikenal sebagai guncangan permintaan positif, dan selanjutnya, peningkatan biaya konstruksi (Mader, 1991).

Revitalisasi ekonomi lokal harus menjadi prioritas bagi para perencana pemulihan. Sangat penting bahwa bisnis lokal kembali ke kapasitas penuh, terutama dalam periode pemulihan segera.

B.3.2 Tujuan, Planning, dan Action Recovery:

Tujuan pemulihan umumnya mencerminkan bidang prioritas untuk pemulihan. Setiap sektor memiliki tujuan pemulihan masing-masing tetapi tujuan keseluruhan mengelompokkan tiga area luas yang akan menjadi fokus pemulihan dan rekonstruksi:

- a. Mempersiapkan lembaga nasional, regional dan lokal, serta masyarakat umum, untuk mencapai kondisi dimuka yang memungkinkan mereka untuk melakukan proses pemulihan pasca bencana secara tepat waktu dan efektif.
- b. Tentukan terlebih dahulu kebijakan, mekanisme dan instrumen yang akan memungkinkan untuk mencapai hubungan yang efektif antara pemulihan jangka menengah dan jangka panjang dan perhatian darurat.
- c. Merumuskan pedoman, mencapai kesepakatan dan pengaturan kelembagaan dan mengembangkan instrumen sebelum terjadinya bencana, yang akan

berkontribusi pada situasi di mana begitu bencana terjadi, pemulihan cepat, berkelanjutan dan tidak mereproduksi risiko (UNDP,2011).

Perencana pemulihan harus memiliki kemampuan untuk mengenali apa yang mungkin mengenai pengurangan risiko dan harus dengan cepat menerapkan pelajaran baru ini ke dalam panduan pemulihan keseluruhan yang mereka kembangkan. Perencana harus menyadari penyebab ketidakadilan proses partisipatif yang luas dan representasional yang dapat memastikan bahwa sumber daya bantuan dan pemulihan tersebar merata di seluruh populasi yang terkena dampak. Kelompok-kelompok berikut cenderung sangat rentan terhadap ketidakadilan dalam pertolongan (NHRAIC, 2001):

- a. *Low-income households*. Berapa banyak uang yang dimiliki orang untuk mempengaruhi jenis perumahan yang mereka tinggali, apakah mereka dapat terlibat dalam aksi mitigasi, dan berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk pulih.
- b. *Single parents*. Orang tua tunggal cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dan kendala yang lebih besar pada waktu mereka. Kendala ini sering membatasi akses keluarga ke banyak kegiatan dan sumber daya pemulihan masyarakat
- c. Ketergantungan medis (fisik dan psikologis) atau cacat.
- d. Bahasa minoritas dan buta huruf.
- e. *Elderly*. Para lansia mungkin diabaikan dalam mempertimbangkan pemulihan holistik karena anggapan stereotip bahwa mereka adalah beban dan bukan produsen untuk suatu komunitas.

- f. Anak-anak. Masyarakat cenderung berorientasi pada orang dewasa. Anak-anak sepenuhnya bergantung pada orang dewasa untuk keselamatan dan keamanan mereka serta untuk makanan, perawatan, dan pendidikan mereka (Mileti 1999).

Perencanaan pemulihan adalah proses yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan dan manajemen risiko yang komprehensif. Dengan demikian, ini bukan hanya produk atau rencana dalam dirinya sendiri, tetapi lebih dari itu menyiratkan serangkaian tindakan berkelanjutan dari berbagai jenis yang dimaksudkan untuk membuat masyarakat lebih tahan terhadap bencana, tidak hanya dengan mengurangi kerentanan untuk mencegah bencana. Dalam urutan gagasan ini, Panduan ini disusun berdasarkan, tiga fase:

- a. Memulai Perencanaan Pemulihan, merupakan tahap menghasilkan strategi yang diterima secara politis, dan didukung secara teknis, finansial dan logistik, yang memungkinkan untuk memasukkan isu Perencanaan Pemulihan ke dalam proses pembangunan nasional atau lokal;
- b. Perencanaan Pemulihan, melibatkan proses menciptakan pengetahuan dan menghasilkan perjanjian yang dapat memberikan kerangka kerja nasional, regional atau lokal yang memprioritaskan skenario risiko yang mungkin, menetapkan kebijakan dan strategi pemulihan, mengidentifikasi kesenjangan dan kekuatan dalam hal kapasitas manajemen dan menentukan instrumen utama yang akan digunakan untuk memfasilitasi proses pemulihan yang mungkin dan

agenda yang harus diikuti untuk melaksanakan pedoman yang telah direncanakan sebelumnya;

- c. Mempersiapkan Pemulihan, adalah serangkaian tindakan yang berasal dari fase sebelumnya yang mengembangkan dan melengkapi hasil yang diperoleh, terutama yang bertujuan untuk membangun kapasitas nasional dan lokal, mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, teritorial dan kelembagaan, memformalkan dan menguji proses dan prosedur, dan mengadopsi instrumen dan kerangka kerja peraturan yang akan berfungsi sebagai tulang punggung dari proses pemulihan akhirnya (UNDP,2011).

Pemulihan bencana hampir selalu merupakan proses yang panjang dan sulit yang lebih sering diukur dalam beberapa dekade daripada dalam hitungan bulan atau tahun, masyarakat mungkin tidak akan pernah pulih jika tidak memberikan bantuan yang tepat. bantuan internasional pascabencana, bahkan negara-negara yang mengalami kerusakan paling parah dapat menikmati tingkat pemulihan tertentu

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah dan Profil Shanti Volunteer Association Shanti

Japan Sotoshu Relief Committee (JSRC), cikal bakal SVA dibentuk sebagai tanggapan atas arus besar pengungsi dari Indocina pada tahun 1979. Berpusat pada para sukarelawan yang berpartisipasi dalam kegiatan activities, pada tahun 1981 organisasi tersebut direformasi menjadi the Sotoshu Volunteer Association. Pada tahun 1999, SVA diakreditasi status hukum, mengubah namanya menjadi Shanti Volunteer Association. Shanti berarti "kedamaian" dalam bahasa Sansekerta. SVA telah melakukan kegiatan yang berfokus pada dukungan pendidikan & budaya di kamp-kamp pengungsi, seperti perpustakaan, percetakan, dan publikasi.

Namun dengan ditutupnya kamp, kegiatan telah bergeser ke kerjasama rekonstruksi dan pembangunan di Thailand, Laos, dan Kamboja. Saat ini di Thailand SVA mengelola perpustakaan, dan taman kanak-kanak di daerah kumuh Bangkok, dan di desa-desa pedesaan di Utara, dan Timur Laut. Di Kamboja, SVA mendukung pembangunan sekolah, kegiatan perpustakaan, pendidikan pra sekolah, budaya dan tradisi dan, pusat pelatihan kejuruan. Juga di Laos, SVA melakukan kegiatan dukungan untuk perpustakaan, pengembangan bahan ajar dan pusat anak-anak.

SVA juga terlibat dalam respon kemanusiaan darurat. SVA telah mendukung para korban gempa bumi di Kobe, Jepang pada 1995-1997, banjir di Kamboja 1996 dan pada 2000-2002, kekurangan pangan di Korea Utara 1997-1998, gempa bumi di Tiongkok 1997, gempa bumi di Turki dan, Taipei-Cina di 1999 di bidang makanan,

tempat tinggal dan sanitasi. SVA telah memberikan bantuan kepada para pengungsi Myanmar yang melarikan diri ke Thailand di sektor pendidikan sejak tahun 2000 sebagai mitra pelaksana UNHCR.

Pada 2011 Organisasi ini berubah dari kerja sama social (social cooperation) menjadi kerja sama sosial public (public social cooperation). Kantor-kantor didirikan di Kota Kesennuma, Prefektur Miyagi, dan Kota Tono, Prefektur Iwate, untuk mendukung para korban yang selamat dari Gempa Besar Jepang Timur. SVA merayakan hari jadinya yang ke-30.” *Libraries Beyond Borders ~ the trajectory of what an NGO has achieved over the past three decades in the area of international cooperation*”. Pada 2012 Kantor didirikan di Kota Yamamoto, Prefektur Miyagi untuk memulai layanan perpustakaan keliling di Kota Yamamoto dan Kota Minamisoma di Prefektur Fukushima(sva.or.jp).

A.1 Kegiatan Bantuan Darurat.

Pada tahun 2003 SVA mendirikan kantor di afganistan, hal ini bertujuan untuk memfokuskan dukungan SVA di wilayah Asia Tenggara, dan memulai kegiatan dukungan pendidikan bagi rakyat Afghanistan bekerjasama dengan LSM regional. Selain itu, pendukung untuk "kampanye buku untuk anak" dan "Recycle Books Aid" (proyek yang menjadi semakin populer sebagai cara berbasis rumah untuk berpartisipasi dalam kerjasama internasional)(SVA,2003).

Dengan kegiatan bantuan darurat, banyak upaya telah ditempatkan pada peningkatan pedoman untuk bencana domestik atau luar negeri, dan meningkatkan sistem bantuan jaringan untuk bencana perkotaan. Pada 2003, gempa bumi terjadi di

Prefektur Miyagi Utara pada akhir Juli, dan di Iran Tenggara. Pada tanggal 26 Juli SVA mengirimkan staf ke lokasi bencana SVA memiliki lima perencanaan dalam memberikan bantuan bagi para korban salah satunya adalah mendirikan pustakarelawan.

Pada 2005, SVA melanjutkan kegiatan bantuan darurat untuk para korban tsunami Samudera Hindia dan Niigata gempa Chuetsu, yang keduanya terjadi pada tahun sebelumnya. Dan dari bulan Februari SVA memulai proyek pendukung, bersama dengan sukarelawan, untuk pengungsi dari letusan gunung berapi di Pulau Miyake untuk kembali ke rumah mereka.

A.1.1 Dukungan Untuk Anak Korban Gempa Di Iran Tenggara

Pada tanggal 26 Desember 2003, gempa bumi besar terjadi di kota Bam di Tenggara Iran, dan pada tanggal 6 Januari SVA mengirim dua anggota staf untuk survei situasi. Mereka menemukan bahwa ada 5.000 anak yang telah kehilangan satu orang tua dan 1.800 anak yang telah kehilangan kedua orang tuanya. Dengan demikian, SVA memutuskan untuk memulai kegiatan pendukung, terutama untuk anak. Kegiatan yang direncanakan untuk 2004 adalah: rekonstruksi panti asuhan di kota Kerman, ibukota Provinsi; Distribusi kebutuhan hidup kepada anak dari semua panti asuhan di kota Kerman; Menyediakan akomodasi sementara untuk sebuah TK dibuka kembali di kota Bam, mendistribusikan kebutuhan hidup dan juga memberikan pelatihan bagi para guru (SVA, 2003).

A.1.2 Gempa Bumi Dan Tsunami Relief Support Sumatera

Ketika gempa terjadi di luar Sumatera pada tanggal 26 Desember 2004, SVA segera meluncurkan kegiatan bantuan bagi korban yang terserang tsunami di Thailand Selatan dan mendistribusikan barang dukungan darurat. Dan untuk merawat penderitaan mental anak, SVA melakukan proyek perpustakaan darurat, pembacaan buku gambar dan Proyek Perpustakaan Mobile. Untuk mendukung dan memberikan bantuan SVA kepada negara-negara yang tertimpa bencana alam, SVA melakukan distribusi barang bantuan, rekonstruksi rumah dan dukungan untuk sekolah pembibitan di Provinsi Tamil di India (melalui ASAG), di Provinsi Aceh di Indonesia (melalui PPSW), yang keduanya LSM aregional , dan di Sri Lanka melalui renege Asosiasi sukarelawan internasional. peran utama memberikan kegiatan bantuan di Provinsi Pang Nga yang menderita kerusakan terburuk dan didistribusikan makanan untuk 500 korban, tenda berukuran besar dan tangki air. Selanjutnya, SVA mendistribusikan seragam sekolah dan perlengkapan sekolah untuk 3.000 anak di daerah tersebut. Dengan bekerjasama dengan departemen studi lingkungan hidup dan masyarakat di Universitas Hirosaki, sebuah publikasi pencegahan bencana yang berjudul "Fire on Rice stack", yang didasarkan pada cerita rakyat Jepang, telah diterbitkan dalam bahasa Thai dan didistribusikan ke sekolah dan pusat kesehatan(SVA, 2005). Setelah masa pertolongan darurat berlalu, peran utama SVA telah bergeser ke dukungan pendidikan. Pada tahun 2006 dan sesudahnya, SVA berencana untuk melakukan kegiatan dukungan restorasi melalui program dua tahun terutama untuk anak dengan kegiatan karavan bercerita, Layanan pinjaman buku, administrasi Perpustakaan darurat dan beasiswa kepada anak di daerah yang terserang.

A.1.3 Relief Support untuk Penduduk Pulau Miyake:

Empat setengah tahun setelah letusan pada tahun 2000 Juni Gunung Oyama di Pulau Miyake, sementara gas vulkanik masih dipancarkan, perintah evakuasi ke semua penduduk pulau itu diangkat pada tanggal 1 Februari 2005. Warga kemudian mulai kembali ke rumah mereka. Dalam rangka membantu mereka, SVA bekerja sama dengan pusat dukungan relawan Tokyo melawan bencana di Pulau Miyake, yang telah mendukung warga sejak letusan gunung berapi dan juga membantu mereka kembali ke rumah mereka untuk membangun kembali Kehidupan. Dari SVA, 65 relawan-terutama mahasiswa-berpartisipasi dengan kata-orang dukungan bagi masyarakat pulau dan membantu mereka dalam pekerjaan penghapusan, membersihkan abu vulkanik, pemotongan pohon, sayuran pertanian dan hal lainnya. Tahap pertama dari proyek ini selesai pada tanggal 23 Agustus, tetapi SVA akan terus mendukung warga melalui Miyake Island House of Winds, yang diselenggarakan oleh para relawan pulau terutama untuk menjaga orang tua (SVA, 2005).

A.1.4 Relief Support untuk Korban Gempa Bumi Di Timur Laut Pakistan:

Gempa di Pakistan Timur Laut terjadi pada oktober 8, 2005 dan menyebabkan korban 73.000 orang. Lebih dari 3.000.000 orang kehilangan rumah mereka. Segera setelah gempa, SVA meluncurkan kegiatan bantuan dengan staf kantor Afghanistan. Sebagai langkah awal, SVA mendistribusikan barang-barang yang sangat diperlukan seperti bahan makanan, tenda dan peralatan memasak untuk 450 keluarga di dua wilayah. Setelah krisis awal telah berlalu, kSVA kembali mendistribusikan hal yang

diperlukan untuk kembalinya hidup, seperti mesin jahit, alat tukang kayu dan persediaan sanitasi.

Pada tanggal 2006 Maret, SVA telah mendirikan 21 Fasilitas Ruang ramah anak atas dasar satu untuk setiap sekolah dasar untuk memungkinkan anak dengan trauma mental untuk menghabiskan waktu dalam damai. Fasilitas yang dibuka secara teratur, terhuyung-huyung dasar setelah pelatihan singkat bagi para guru, dan bahkan di musim dingin kegiatan membaca buku, bercerita, bermain game dan olahraga .

A.1.5 Sumatra Island Earthquake Disaster Relief Support

Pada 30 September 2010, pusat gempa bumi 45 km barat-barat laut Padang, Sumatra Barat, Sumatra, Indonesia, 739 tewas, 296 hilang (10/8: pengumuman Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia) Menyusul terjadinya Gempa Sumatra-Oki, SVA pada Selasa, 6 Oktober bersama Katsumasa Yagisawa (Direktur Regional Asia) Koichiro Atsugi, yang bertanggung jawab atas bantuan darurat, dikirim ke area "Padang Pariaman" di area bencana. Distribusi makanan dan obat-obatan telah dimulai sebagai bantuan darurat. melalui desa-desa pegunungan yang terkena dampak satu per satu bekerja sama dengan tim medis darurat organisasi LSM lokal " SHEEP Indonesia Foundation ". Dari tanggal 11, di desa-desa di mana bantuan tidak tersedia, SVA mulai mendistribusikan persediaan darurat seperti makanan sambil menyelidiki kerusakan. Dalam pemberian bantuan SVA mendistribusikan makanan seperti nasi, ikan rebus kalengan dan susu kaleng (susu bubuk skim) dibagikan ke setiap rumah tangga. Beberapa anak hanya makan "ramen instan" selama sekitar dua minggu sejak bencana

SVA mendistribusikan bahan-bahan dasar sehingga masyarakat dapat memiliki makanan bergizi (SVA, 2011).

A.1.6 Banjir Myanmar Tenggara dan topan di Filipina.

Curah hujan deras yang berlanjut selama beberapa minggu dari akhir Juli 2013 menyebabkan kerusakan besar-besaran terutama di Provinsi Karen dan Mon di Myanmar Tenggara. Di wilayah selatan Provinsi Karen, di mana para korban dibiarkan tanpa bantuan bahkan setelah dua bulan karena aksesibilitas yang buruk di daerah itu, kami mendistribusikan unit filter pasir untuk membuat air minum yang aman ke 895 rumah tangga dan peralatan / pasokan toilet untuk 260 rumah tangga. Kami juga membagikan seragam sekolah, tas sekolah, dan set alat tulis kepada 800 anak-anak yang terkena dampak, dan memberikan dukungan belajar bagi anak-anak yang tidak dapat pergi ke sekolah karena bencana, setelah sekolah dibuka kembali. Topan super Haiyan, yang melanda Filipina tengah pada 8 November 2013, menyebabkan kerusakan besar akibat badai hujan deras dan gelombang pasang dan banyak orang meninggal atau kehilangan rumah dan properti mereka. SVA melakukan survei awal dari pertengahan November di Pulau Samar di Provinsi Samar Timur dan mendistribusikan alat-alat pendukung kehidupan termasuk makanan, kelambu, pot dan pakaian dalam ke 460 rumah. Hal ini berlaku di dua desa di kota Hernani.

Dari akhir 2013 hingga Februari 2014, SVA juga mengoperasikan sebuah proyek untuk mendistribusikan perangkat rekonstruksi rumah, termasuk lembaran galvanis, kayu lapis, paku dan peralatan, ke 2.152 rumah tangga di 16 desa di kota

Quinapondan, yang merupakan salah satu kota yang ditinggalkan dari kegiatan bantuan karena kerusakan manusia terbatas. Ketika musim angin topan berlanjut, SVA dapat membantu menciptakan lingkungan hidup yang nyaman yang terlindung dari unsur-unsur atap dan dinding, untuk orang-orang yang terkena dampak bencana yang telah berkerumun bersama di tenda-tenda yang dipasok oleh organisasi bantuan internasional. Setelah Maret, SVA akan mengerjakan rekonstruksi Pusat Penitipan Anak (fasilitas pendidikan pra-sekolah) di Quinapondan (SVA,2014).

A.1.7 Typhoon Damage in the Philippines and Earthquake Damage in Yunnan, China in fiscal 2014.

SVA terus mendukung kegiatan dalam tahun fiskal 2014 di Kota madya Quinapondan, Provinsi Samar Timur, Pulau Samar, Filipina; yang dilanda topan pada 8 November 2013. SVA memasok bahan-bahan seperti lembaran galvanis dan kayu lapis, dan alat-alat seperti palu dan paku, untuk memperbaiki dan / atau membangun kembali rumah untuk 2.152 rumah tangga di 16 desa. Kami memulihkan lima bangunan pusat penitipan anak, yang menyediakan pendidikan untuk anak-anak dari usia tiga hingga lima tahun; dan melakukan program perawatan trauma untuk mereka dan orang tua mereka. Pusat penitipan anak yang dibangun kembali dengan kokoh berfungsi sebagai tempat berlindung bagi penduduk lokal di keluarga saya yang harus dilakukan pada saat terjadi bencana.

Gempa bumi berkekuatan 6,5 terjadi di Kabupaten Ludian Kota Zhaotong di Provinsi Yunnan, Cina pada 3 Agustus 2014, menghantam daerah-daerah miskin di

pegunungan. SVA memasok peralatan masak dan jaket bawah ke delapan lokasi di Longtoushan Zhen dari Longjing Cun, sebuah ngarai yang tidak terjangkau, di mana hampir tidak ada pasokan bantuan yang disediakan. Selain itu, kami menyediakan futon, tikar, kemeja tahan dingin, dan jaket bawah untuk para korban di enam lokasi Huodehong Zhen yang harus tinggal di tenda sementara dan membutuhkan (SVA,2014).

B. Bencana alam Sulawesi Tengah dan Profil daerah Terdampak.

Bencana alam 28 September 2018 yang melanda wilayah Kota Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala), Sulawesi Tengah, Gempa berkekuatan 7.4 SR menggoncang Palu dan sekitarnya dan selang beberapa menit terjadi sesuatu yang mengerikan di Pantai Talise maupun disekitar perairan Teluk Palu. Gelombang Tsunami menghantam dan meluluh lantahkan sebagian kota Palu yang berada di pesisir Pantai Talise.

Disaat yang bersamaan pula Balaroa, Petobo dan Sebagian Kabupaten Sigi mengalami Likuifaksi setelah terjadinya Gempa 7.4 SR, tanah-tanah mulai terangkat dan adapula tanah berubah menjadi lumpur sehingga bangunan-bangunan di atasnya terdesak ke bawah lumpur dan tertimbun. Kabupaten Donggala dan sebagian Mamuju tidak luput dari incaran gempa terdahsyat ini dimana sebelumnya gempa terjadi di Kabupaten Donggala kira-kira 5.0 SR Pada Sore hari yang kemudian menyusul dengan 7.4 SR (kompasiana.com).

Kejadian gempa, tsunami, dan likuifaksi membuat ribuan masyarakat Pasigala mengungsi di tenda-tenda darurat. Melihat dari lokasi pengungsi di Kabupaten Sigi dan Donggala sebanyak 258 titik lokasi dimana jumlah pengungsi sebesar 119.534 jiwa, tidak semua pengungsi dapat menerima bantuan yang diakibatkan oleh terputusnya akses jalanan dan keterbatasan pasokan makanan. Ditambah kamp-kamp pengungsi yang dibangun seadannya membuat rentanya tindakan kekerasan, terutama bagi kaum perempuan dan anak.

DATA KORBAN JIWA

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KORBAN JIWA			TOTAL KORBAN JIWA PER KAB/KOTA
		JIWA MENINGGAL	JIWA HILANG	KORBAN DIKUBUR MASSAL	
1	PALU	2,132	531	1,016	3,679
2	SIGI	289	116	0	405
3	DONGGALA	249	54	0	303
4	PARIGI MOUTONG	15	0	0	15
	TOTAL	2,685	701	1,016	4,402

DATA PENGUNGSIS

NO	KAB/KOTA	KONDISI PENGUNGSIS		
		TITIK PENGUNGSIS	KK	JIWA
1	PALU	127	11,165	40,738
2	SIGI	160	29,867	93,187
3	DONGGALA	98	11,478	36,346
4	PARIGI MOUTONG	15	662	2,728
	TOTAL	400	53,172	172,999

sumber: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Wilayah Sulawesi Tengah dengan letak geografis dekat garis khatulistiwa, dengan garis pantai yang panjang, sebagian topografinya berupa daerah dengan kemiringan yang besar, kondisi geologi yang unik berupa tanah dan batuan endapan yang membentuk dataran serta yang terpenting berada pada daerah rawan gempa, menyebabkan daerah ini sangat rawan mengalami berbagai bencana alam. Bencana yang terjadi adalah banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa dan tsunami.

Wilayah Sulawesi Tengah yang secara geografis dekat daerah khatulistiwa, dengan topografis bertebing/berlereng serta kondisi geologi berupa tanah endapan berupa pasir, kerikil dan batu yang sangat mudah berpindah oleh air sangat rentan mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Pemanfaatan lahan pertanian, perkebunan serta hutan yang tidak baik menyebabkan tanah cepat kering pada musim kemarau dan tidak mampu menyimpan air pada musim hujan sehingga vegetasi (tetumbuhan penutup tanah) semakin minim dan hanya tinggal menunggu waktu daerah-daerah yang rawan bencana akan mengalaminya. Menyimak kondisi riil di lapangan maka sangat mendesak dilakukan usaha-usaha yang dapat mencegah atau mengurangi dampak bencana tersebut sehingga dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa.

Tidak hanya banjir dan tanah longsor ternyata wilayah Sulawesi Tengah yang memiliki potensi hasil laut, ternyata juga rawan terhadap bencana air pasang dan tsunami sebagai akibat sekunder gempa dan longsoran di dasar laut. Garis pantai yang panjang memerlukan penanganan yang secepatnya agar bahaya tsunami yang mungkin

terjadi dapat diminimalisir karena pantai-pantai sepanjang wilayah tersebut tercatat pernah mengalami tsunami yang menyebabkan korban harta benda dan jiwa manusia.

B.1 Profil Kabupaten Donggala

Kabupaten Donggala terletak antara $0^{\circ},30''$ Lintang Utara dan $2^{\circ},20''$ Lintang Selatan serta $119^{\circ},45''$ - $121^{\circ},45''$ Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	berbatasan dengan Kabupaten Tolitoli dan Kota Palu
Sebelah Timur	berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong, Kota Palu dan Kabupaten Sigi
Sebelah Selatan	berbatasan dengan Sulawesi Barat, Kota Palu dan Kabupaten Sigi
Sebelah Barat	berbatasan dengan Selat Makassar dan Sulawesi Barat

a) Luas Wilayah

Kabupaten Donggala pada saat ini memiliki wilayah seluas 5.275,69 Km² yang terbagi atas 16 kecamatan yaitu: Kecamatan Rio Pakava, Kecamatan Pinembani, Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Sindue, Kecamatan

Sindue Tambusabora, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan Damsol, Kecamatan Sojol, dan Kecamatan Sojol Utara(donggala.go.id).

b) Potensi Bahaya dan Risiko

Terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, Donggala masuk dalam kawasan lempeng tektonik aktif, terutama dengan keberadaan Sesar Palu-Koro. Oleh karena itu, kabupaten ini berpotensi mengalami gempa bumi besar, tsunami, banjir, dan kebakaran hutan. Perubahan iklim di masa mendatang cenderung memperbesar intensitas badai ekstrem yang mengakibatkan banjir besar. Kabupaten Donggala memiliki Angka Indeks Risiko Bencana BNPB 189 (tinggi) dan menduduki peringkat ke-80 dari 496 kabupaten yang memiliki resiko bencana.

c) Kerentanan Lingkungan Alam

Kondisi topografi yang terjal di Kabupaten Donggala, menyebabkan sebagian besar areanya memiliki potensi rawan longsor, aliran debris, dan erosi. Potensi-potensi bahaya ini pada akhirnya juga menyebabkan sejumlah besar endapan sedimen (tanah dan batuan) hasil dari longsor, debris dan erosi mengisi dasar sungai dan menyebabkan potensi bencana banyak banjir lebih besar serta penambahan endapan sedimen di daerah pesisir. selain itu di daerah pesisir pantai, hilangnya hutan bakau juga telah menyebabkan meningkatnya abrasi pantai. Daerah dataran rendah di pantai juga berisiko terkena intrusi garam dari gelombang pasang dan tsunami. Banjir sering terjadi di Kabupaten Donggala selama musim hujan, sedangkan kekeringan sering terjadi di

musim kemarau. Perubahan iklim di masa depan mungkin akan meningkatkan keparahan banjir dan kekeringan.

d) Lingkungan Ekonomi

Daerah ini mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan antara lain disektor pertanian dengan komoditi yang dihasilkan berupa kakao, kelapa dalam, kopi robusta, cengkeh, lada, jambu mete, dan cengkeh. Untuk kegiatan pertanian didaerah ini, hasil pertanian yang utama berupa bahan tanaman pangan berupa padi, tanaman hortikultura, dan palawija. Tanaman bahan pangan tentunya dengan padi sebagai primadona di samping jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian menjadi ujung tombak kegiatan ekonomi secara keseluruhan (palu.bpk.go.id).

e) Kondisi pasca gempa

merupakan wilayah terdampak gempa dan tsunami. Kondisi Donggala terpantau cukup parah, khususnya di wilayah yang dekat dengan garis pantai. Banyak bangunan roboh dan sejumlah jenazah yang terjebak belum dapat dievakuasi. Warga juga belum menerima bantuan logistic (metrotvnews.com).

B.2 Profil kabupaten Sigi

Kabupaten Sigi terletak di sebelah selatan Lembah Palu. Wilayah geografisnya terbentang pada koordinat 0o 52' 16" Lintang Selatan (LS) hingga 2 o 03' 21" LS dan 119 o 38' 45" Bujur Timur (BT) hingga 120 o 21' 24 BT.

Sebelah Utara	berbatasan dengan Kabupaten Donggala dan Kota Palu
Sebelah Timur	berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong Kabupaten Poso.
Sebelah Selatan	berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan
Sebelah Barat	berbatasan dengan Kabupaten Donggala dan Provinsi Sulawesi Barat.

a) Luas wilayah

Luas wilayah daratan Sigi adalah 5.196,02 Km² atau sekitar 7,64 persen dari total luas daratan Sulawesi Tengah. Berdasarkan letak geografisnya, Sigi menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang tidak memiliki garis pantai, dengan batas-batas wilayah

b) Secara administratif

Kabupaten Sigi terbagi menjadi 15 kecamatan, 156 desa dan 1 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Kabupaten Sigi beribukota di Bora, sekitar 16 Km dari Kota Palu. Secara umum, wilayah Kabupaten Sigi dapat ditempuh melalui jalur darat dengan jarak antar ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten yang beragam. Ketinggian wilayah Kabupaten Sigi berkisar 32-1.350 m, dimana titik terendah berada di Kantor Camat Dolo (Kota Pulu) dan tertinggi di Kantor Camat Marawola Barat (Dombu).

c) Geologi Kabupaten Sigi

Secara geografis dan proses geologis daratan di Sulawesi Tengah khususnya di Wilayah Kabupaten Sigi terbentuk karena adanya kegiatan tektonik sehingga terjadi proses pengangkatan dan penurunan. Adanya pengangkatan dan penurunan menyebabkan adanya beberapa permukaan tanah terangkat cukup tinggi. Secara fisiografis, daerah ini dibangun oleh rangkaian pegunungan dengan celah yang sempit dan dalam. Di bagian barat terdapat pelurusan lembah yang mempunyai arah barat laut-selatan selatan tenggara (Lembah Palu, Lembah Mui, Lembah Halua, Lembah Koro, Lembah Leboni terus masuk ke Teluk Bone) dan merupakan ekspresi morfologi.

d) Keadaan Demografis Umum

- Sesuai hasil data kependudukan tahun 2009, populasi Kabupaten Sigi mencapai 212.613 jiwa dengan 109.502 jiwa penduduk laki-laki dan 103.112 jiwa penduduk perempuan.
- Pada akhir tahun 2009 kepadatan penduduk tercatat sebanyak 41 jiwa/km², dengan luas wilayah Kabupaten Sigi 5.196,02 km².
- Rasio jenis kelamin di Kabupaten Sigi Tahun 2009 adalah sebesar 106, yang berarti setiap 106 laki-laki terdapat 100 perempuan.
- Indeks pembangunan manusia mencapai angka 69.45%

e) Kondisi pasca gempa

Akses jalan yang terputus masih menjadi kendala utama yang harus dihadapi untuk menuju Wilayah Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Wilayah ini termasuk daerah yang cukup parah terkena gempa dan longsor. akses listrik dan saluran komunikasi di wilayah ini masih terputus, kurang perlengkapan dan fasilitas di Hunian Sementara. Di tempat ini ratusan rumah hancur tak berbentuk usai terkena gempa (tribunnews.com).

BAB IV

PEMBAHASAN

Kontribusi Shanti Volunteer Assosiation dalam penanganan pasca bencana alam 2018 di Sulawesi Tengah

Dalam rangka pencapaian kontribusi penanganan pasca bencana Shanti Volunteer Association (SVA) melakukan langkah respon bencana sesuai dengan *Core Humanitarian standard* (CHS) terhadap masyarakat di berbagai titik lokasi yang belum terjangkau pendistribusian bantuan. SVA melakukan kerjasama dengan organisasi lokal yaitu Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan di Sulawesi Tengah (KPKPST) yang dianggap kompeten dalam pengalaman dan memiliki *grassroot* diberbagai wilayah di Sulawesi Tengah. Bantuan terhadap masyarakat dibagi menjadi dua tahapan program bantuan tahap awal yaitu *Emergency Relief* oleh SVA, yang merupakan tahap awal bantuan bencana yaitu:

1. pemberian bantuan basic paket terhadap anak-anak, wanita kepala rumah tangga, dan lansia;
2. pengumpulan data terhadap korban bencana sebagai tindakan pemulihan pasca bencana;
3. pelatihan dan pemberian trauma healing di berbagai tenda-tenda pengungsi.

Kegiatan pemberian bantuan ini dilakukan selama 22 hari dimulai pada 20 oktober 2018 dimana jangka waktu pelaksanaan program selama 1 bulan, sesuai dengan

perijinan yang diberikan oleh pemerintah dalam pemberian bantuan cepat tanggap untuk mendistribusikan bantuan ke berbagai desa di kabupaten Sigi dan Dongala.

Setelah program bantuan cepat tanggap selesai dijalankan. SVA melaksanakan program bantuan tahap kedua yaitu pemulihan terhadap masyarakat yang dapat disebut sebagai program, *Support for women's livelihood recovery* yang merupakan kelanjutan dari pemberian bantuan kemanusiaan terhadap korban program bantuan ini berdasarkan dengan prinsip *disaster recovery* yaitu pemulihan ekonomi pasca bencana. Program bantuan ini bertujuan untuk:

1. memulihkan kondisi ekonomi masyarakat pasca bencana sehingga masyarakat dapat melanjutkan kehidupannya seperti semula pasca bencana;
2. pemberian alat dan pelatihan kepada kelompok wanita, guna mengelola hasil ladang secara mandiri.

Program bantuan jangka panjang ini diutamakan kepada korban bencana yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah mengenai pemberdayaan masyarakat akibat bencana, terkhusus perempuan kepala rumah tangga. Program ini disusun dari mayoritas kebutuhan masyarakat pasca bencana di Sigi dan Dongala yang melakukan kegiatan bercocok tanam dan ada sebagai buruh lepas perkebunan. Hal ini juga dapat meminimalisir jatuhnya korban dan pembangunan ulang ekonomi pasca bencana bagi masyarakat.

Dalam merespon kejadian bencana alam sesuai dengan prinsip *the do not harm*, SVA sebagai *aid organisation* melakukan beberapa tahapan-tahapan yang akan

dilakukan dilapangan sehingga program-program dapat berjalan dengan efisien dan mempermudah dalam melakukan tindakan pertolongan bagi para korban bencana alam. Tahapan yang dilakukan SVA yakni melakukan penilaian situasi di lapangan dan melihat apa yang menjadi kebutuhan dasar dan urgen bagi pengungsi. sehingga program bantuan dapat tersalurkan bagi para korban pengungsi di berbagai daerah/titik pengungsian yang masih sulit dijangkau.

Penilaian situasi di lapangan yang dilakukan seperti:

1. Area terdampak: dalam pemetaan area terdampak bencana di Sigi dan Donggala pihak SVA melakukan penilaian dilapangan yang menghasilkan data bahwa terdapat 22 desa yang akan diberikan bantuan. Pemetaannya dapat dibagi seperti kabupaten Sigi sebanyak 12 desa dan kabupaten Donggala 10 desa.
2. Korban atau penerima bantuan:
 - a) Lansia: pemberian bantuan kepada lansia terkhusus perempuan dianggap perlu karna kondisi fisik yang rentan menjadi korban.
 - b) Perempuan kepala rumah tangga: mayoritas korban perempuan merupakan penopang ekonomi di keluarganya yang memiliki pendapatan di bawah upah minimum.
 - c) Anak-anak: SVA merupakan organisasi yang juga berfokus pada anak-anak sehingga bantuan terhadap anak-anak menjadi prioritas.

3. Kondisi terkena dampak: melihat kondisi masyarakat yang masih trauma akibat bencana dan setelah bencana, mengakibatkan perlunya penanggulangan psikologi terhadap masyarakat.
4. Situasi korban: masih kurangnya kamp-kamp medis dilapangan terutama di daerah yang belum terjangkau oleh pemerintah. masyarakat di daerah terpencil tidak mendapatkan gizi yang layak diakibatkan akses jalan dan perkebunan masyarakat yang rusak akibat bencana. ditambah keringnya sumur masyarakat yang merupakan sumber air sehari-hari, sehingga terdapat kelangkaan air diberbagai lokasi.
5. Kerusakan: dalam temuan dilapangan bahwa banyak bangunan rumah masyarakat yang mengalami retak dan tidak aman untuk ditinggali, sehingga masyarakat membuat tenda darurat di halaman rumah mereka.

Setiap pengambilan keputusan program bantuan SVA melakukan kordinasi dan kontrol dengan pihak KPKPST sebagai mitra kerja dalam pengambilan keputusannya, hal ini bertujuan untuk menefektifkan setiap program yang dijalankan dan dapat menentukan sumber daya staf yang ada dilapangan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam merealisasikan program bantuan.

Dalam hal ini, SVA melakukan bantuan cepat tanggap dan pemulihan ekonomi korbna bencana. Dimana kehadiran SVA dapat membantu, terutama dalam hal pemulihan ekonomi korban Bencana dengan kerjasama yang baik, SVA dan KPKPST setidaknya membantu pemerintah dalam hal pemberdayaan masyarakat ditengah keterbatasan anggaran, pemerintah khususnya pemerintah daerah kepada sector

pemberdayaan masyarakat karena harus lebih menganggarkan pada sektro Infrastruktur di pasca bencana.

A. Peran SVA dalam Menjalankan Bantuan Cepat tanggap

Dalam ranganka respon cepat tanggap sesuai dengan kordinasi PBB pada 2005 untuk melakukan tanggapan kemanusiaan global terhadap korban, SVA melakukan kordinasi dengan Lembaga-lembaga pemerintah yang memegang otoritasnya disetiap desa untuk mengumpulkan masyarakat yang menjadi kategori penerima bantuan sehingga tidak terjadi gesekan budaya antara *aid organization/humanitarian workers* dengan masyarakat yang menerima bantuan. Kordinasi yang baik dengan lembaga pemerintahan dilakaunan dua hari sebelum pendistribusian bantuan kepada para korban. Pendekatan terhadap budaya penting dilakukan untuk mempermudah dan me-efesienkan waktu dalam pendistribusian bantuan di berbagai desa.

Ikut terlibat dalam pendistribusian bantuan;

1. Pemberi dana dan pengecekan pengeluaran dana;
2. Kontrol terhadap pendistribusian ke wilayah yang telah dijadwalkan;
3. Memberikan laporan bagi kantor pusat dan pemerintah;
4. Mengumpulkan data temuan dilapangan.

Bantuan kemanusiaan terhadap korban pengungsi Sigi dan Donggala mencakup pada bantuan yang diberikan oleh Organisasi kemanusiaan untuk tujuan kemanusiaan, tanpa adanya pengaruh politik dalam kegiatannya. Dalam menjalankan kontribusi

terhadap bantuan bencana SVA berperan sebagai pemberi bantuan dan pendanaan bagi para korban bencana. Adapun kegiatan yang dilakukan seperti:

A.1 Bantuan Basic Paket,

SVA dan KPKPST telah memberikan bantuan seperti Paket kebutuhan dasar (Bahan makanan pokok, perlengkapan mandi hingga keperluan dasar perempuan dewasa) terhadap 1000 kepala rumah tangga di Kabupaten Sigi dan 200 kepala rumah tangga di Kabupaten Dongala, paket kebutuhan dasar ini berfungsi sebagai tindakan emergency assist yang diambil dari ruang lingkup geografis bencana dimana masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan kebutuhan pokok seperti makanan di beberapa lokasi bencana, terkhusus wanita yang mengambil posisi sebagai kepala rumah tangga akibat bencana.

Selain paket dasar SVA memberikan 200 perlengkapan bayi (makanan, pakaian dan popok) dan 200 perlengkapan sekolah (alat tulis dan baju sekolah). Hal ini berdasarkan pada moto SVA sebagai organisasi yang bergerak pada bidang Pendidikan dan anak. Sedangkan SVA juga memberikan 220 tenda dan 400 kelambu, dimana terdapat beberapa tempat seperti di desa jon oge, loru, lolu, bobo, sambo dan balimpewa. Yang dimana pemukiman penduduk yang tidak layak huni sehingga masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pemukiman sementara.

Gambar 1

Pemberian Basic Paket Terhadap Masyarakat



Sumber: Dokumentasi pribadi

Bantuan cepat tangap ini dikemas menjadi paket sehingga korban tidak berebut untuk mendapatkan bantuan logistik, dimana terdapat korban yang menerima pasokan logistik tanpa kemasan, sehingga terjadi tidak meratanya penerima bantuan bagi para korban.

SVA melalui penilaian situasi yang dilakukan para staf lapangan. Hal ini dapat menjadi dasar bagi SVA menentukan kebutuhan para korban sehingga dapat menciptakan *the effectiveness of its work by short-term project*, sehingga kebutuhan *smart relief* dapat disalurkan ke berbagai lokasi.

A.2 Pengumpulan data pemulihan masyarakat.

Dalam melakukan pengumpulan data dan mewawancarai para korban, staf SVA dan relawan yang membantu mengambil data melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban sehingga tidak menciptakan trauma akibat bencana kepada korban. Dalam mengumpulkan data pertanyaan yang diajukan berhubungan dengan kondisi yang dialami sebelum dan sesudah bencana, pekerjaan masyarakat sebelum/setelah bencana, jumlah pendapatan, kebutuhan masyarakat setelah terjadi bencana, dll.

Tujuan melakukan wawancara kepada korban secara langsung berfungsi sebagai pengumpulan data yang memegang teguh prinsip *Cultural Awareness* dalam proses bantuan kemanusiaan. Setelah pendistribusian bantuan staf SVA dan relawan melakukan wawancara mendalam terhadap para korban sehingga hasil informasi dari wawancara dapat diidentifikasi menjadi peta kebutuhan masyarakat di berbagai daerah dan data untuk melakukan program pemulihan kepada masyarakat,

Gambar. 2

Wawancara dan Pendataan Masyarakat



Sumber: Dokumentasi pribadi

Melalui data yang terkumpul dapat dikaji dan dilaporkan kepada pemerintah dan kantor pusat SVA, hal ini dapat mempermudah tindak lanjut guna memulihkan kondisi masyarakat seperti semula. Hal ini juga sebagai upaya manajemen sebelum kejadian bencana untuk melakukan pemulihan pasca bencana.

A.3 Melakukan trauma healing di berbagai tenda-tenda pengungsi.

Trauma yang diderita masyarakat yang terjadi di Sigi dan Dongala perlu penanganan yang panjang untuk membuat masyarakat korban bencana melupakan kejadian pasca bencana, dimana masyarakat masih mengalami kepanikan dan kepastian ketika bencana terjadi, terkhusus kepada perempuan dan anak.

Pemberian trauma healing merupakan bagian dari bantuan kemanusiaan sehingga kondisi psikologis masyarakat dapat lebih baik setelah bencana terjadi. SVA dan KPKPST melakukan pelatihan kepada relawan sebelum mendekati para korban, sehingga ketika pendistribusian bantuan para staf tidak membuat masyarakat mengingat kejadian yang dialami dan tidak memberikan janji terhadap masyarakat.

Beberapa kasus yang ada dilapangan bahwa banyak masyarakat yang belum mendapatkan kepastian terhadap kondisi yang mereka alami, sebagai pekerja kemanusiaan pendekatan psikologi terhadap korban sangat penting berdasarkan dengan pengambilan keputusan tidak boleh tergesah-gesah sebagai contoh, temuan dilapangan bahwa ada beberapa pekerja kemanusiaan yang memberikan janji terhadap masyarakat sedangkan dengan waktu dan regulasi perijinan yang pendek dari pemerintah membuat

ketidakpastian terhadap masyarakat. Hal ini dapat memperburuk kondisi yang mereka hadapi.

Gambar. 3

Trauma Healing Terhadap Masyarakat



Sumber: Dokumentasi pribadi

Dari fakta dilapangan bahwa masyarakat masih mengalami kondisi trauma yang berkepanjangan ketika bencana terdapat gempa susulan yang masih sering terjadi, sehingga penanggana yang dilakukan memerlukan proses waktu yang berkepanjangan dalam pemulihan masyarakat.

B. Peran SVA dalam Menjalankan Program Support for women's livelihood recovery, sebagai bantuan pemulihan ekonomi masyarakat

Di antara para korban, perempuan sangat rentan setelah bencana. Sulit untuk merekonstruksi kehidupan sendiri karena ketidak mampuan untuk terus bertani, yang merupakan sumber pendapatan sebelum gempa bumi dan tsunami. Selain itu, ada faktor lain dimana masyarakat mengalami evakuasi yang berkepanjangan, mengakibatkan rentan terjadi kekerasan. Dimana program ini bertujuan untuk pemulihan mata pencaharian sehingga para perempuan dapat memulihkan kehidupan mereka sesegera mungkin. Dalam tahap *Planning For Recovery*, SVA telah melakukan beberapa tindakan dapat dijabarkan seperti

1. Memulai perencanaan pemulihan: SVA melakukan perencanaan waktu program yang akan dijalankan kepada korban penerima bantuan untuk menjalankan program Support for women's livelihood recovery dimana tujuannya untuk memajukan ekonomi masyarakat pasca bencana.
2. Mencapai kesepakatan: dimana SVA telah melakukan kordinasi dengan pemerintah untuk mendapatkan izin melaksanakan program pemulihan ekonomi yang akan dilaksanakan di berbagai daerah terdampak.
3. Mempersiapkan rencana Pemulih: melalui data-data yang telah dikumpulkan SVA dan KPKPST menyusun lokasi, menyiapkan pelatihan dan kebutuhan alat yang diperlukan untuk menopang perekonomian masyarakat sesuai dengan wilayah bercocok tanan.

4. Mempersiapkan Pemulihan: dalam persiapannya SVA mempersiapkan tim pelatihan, anggaran yang dibutuhkan dan barang kebutuhan dalam pemulihan masyarakat.

Setelah melakukan tujuan dan perencanaan bagi program pemulihan perekonomian korban SVA dan KPKPST melakukan tindakan pemulihan terhadap kelompok wanita yang dilakukan seperti:

- a) Menyediakan bahan dan peralatan untuk membuat makanan olahan.
- b) Untuk membuat produk berkualitas tinggi, SVA melakukan pelatihan pengolahan makanan.
- c) melakukan pelatihan penjualan dan pemasaran untuk meningkatkan penjualan.
- d) Pelatihan akuntansi dan manajemen untuk melanjutkan ekspansi bisnis.
- e) Setelah memulai kegiatan, SVA akan memberikan saran dan dukungan agar bisnis wanita dapat berada di jalur yang benar.

Rekonstruksi dari gempa bukan hanya tentang kembali ke pertanian dan perikanan, yaitu kembali ke aslinya. Di bawah konsep pemulihan bencana, "Build Back Better", proyek utama SVA adalah untuk menambah nilai, seperti produksi makanan olahan, untuk menciptakan kehidupan dan masyarakat yang lebih baik daripada sebelum gempa bumi.

B.1 Pendistribusian Mesin

Pemberian mesin terhadap masyarakat merupakan tahap dimana produksi dapat mempengaruhi pendapatan keluarga. Efek-efek ini dibedakan, tergantung pada apakah mereka yang terkena dampak adalah pekerja pedesaan atau perkotaan dan jika mereka adalah bagian dari ekonomi formal atau informal. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak ekoneomi akibat bencana , masyarakat perlu untuk menciptakan pekerjaan sementara atau permanen. Sehingga masyarakat dapat menghasilkan pendapatan guna menopang kebutuhan dasart pasca bencana. Dimana pemberian peralatan ini memfokuskan pada:

1. Perempuan yang membentuk usaha secara kelompok.
2. Kelompok usaha yang sebelumnya diantara mereka adalah pelaku usaha Pra Bencana.
3. Mampu bekerja secara kelompok.
4. Usaha yang dimiliki adalah usaha dengan bahan dasar yang mudah didapat diwilayah tempat tinggal mereka.

Dengan bantuan mesin yang diberikan SVA ini masyarakat dapat memulai produksi perkebunan sehingga pendapatan ekonomi mereka tidak hanya berupa produk mentah melainkan menjadi produk jadi yang dapat menambahkan nilai dari produk yang mereka kembangkan.

Gambar 4

Pendistribusian Alat Produksi Rumahan



sumber: Shanti volunteer Assosiation

bantuan peralatan dan mesin yang terkhusus bagi kelompok usaha perempuan sebagai bentuk penguatan sisi ekonomi dan bentuk pemebrian trauma healing yang dianggap lebih evisien. Dalam penyaluran bantuan SVA memberikan tanggung jawab penuh kepada KPKPST unruk mendistribusikan bantuan di 19 desa dan 20 kelompok usaha yang ada diKabupaten Sigi dan Dongala.

B.2 Pelatihan Terhadap Perempuan

Pelatihan terhadap masyarakat dilakukan SVA dan KPKPST sebagai tindakan pemuliahan ekonomi sebagai fase pemulihan masyarakat pasca bencana untuk

membangun kapasitas masyarakat lokal dan meningkatkan ekonomi social dari masyarakat yang terdampak akibat bencana.

Pemberian pelatihan ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi masyarakat terkusus di Sigi dan Dongala sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan alat teteapi diberikan pelatihan pengolahan tetapi korban dapat mendapatkan skill dalam mengelola hasil ladang mereka secara mandiri.

Adapun program yang akan dijalankan seperti:

1. proyek dukungan pemulihan mata pencaharian di mana perempuan yang terkena dampak memproduksi dan menjual makanan olahan sendiri.
2. memberikan pelatihan tentang kekerasan berbasis gender dan hak-hak perempuan, serta pembuatan dan pemasaran makanan olahan dan manajemen kebersihan.
3. pelatihan masyarakat untuk mengembangkan usaha seperti dodol,minyak kelapa,kopi,bawang,dll.

Menggunakan bahan dan peralatan yang disediakan oleh SVA, anggota kelompok masyarakat melakukan kegiatan produksi dengan berbagi peran. Perempuan yang sebelumnya tidak mengelola pendapatan dan pengeluaran belajar dalam pelatihan, menulis dalam buku catatan, dan mengelola uang.

Gambar. 5

Pelatihan Terhadap Masyarakat



sumber: Shanti volunteer Assosiation

Melalui pelatihan ini merupakan strategi pemulihan terhadap peningkatan kesenjangan terkhusus bagi wanita dan kekuatan dalam hal kapasitas manajemen pemulihan. SVA dan KPKPST menjadi instrument untuk memfasilitasi proses pemulihan yang telah menjadi program pemulihan ekonomi masyarakat yang berdasarkan kepada pedoman kemanusiaan.

B.2.1 Hasil Peoduksi Masyarakat

SVA dan KPKPST juga akan melakukan beberapa kerjasama distribusi terhadap hasil dari bahan jadi yang diproduksi oleh masyarakat nantinya akan dipasarkan di supermarket sekitar Sulawesi Tengah dan pasar

di pulau Jawa melalui koneksi yang dimiliki oleh KPKPST sehingga produk ini dapat menjadi ciri khas masyarakat.

Gambar. 6

Hasil Produksi Masyarakat



sumber: Shanti volunteer Assosiation

Melalui kegiatan kemanusiaan ini SVA dapat mentransfer proyek ini ke pemerintah daerah, dan SVA juga bertujuan untuk membantu pemerintah dalam memulihkan kondisi ekonomi masyarakat yang pasca bencana sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan mereka seperti semula dan membantu perekonomian keluarga mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Kontribusi Shanti Volunteer Assosiation dalam penanganan pasca bencana alam 2018 di Sulawesi Tengah, bahwa SVA memiliki kontribusi terhadap bantuan kemanusiaan bagi para korban bencana, dengan melakukan manajemen bencana yang baik SVA dapat melakukan program cepat tanggap bagi para korban dan dapat mengurangi penderitaan masyarakat yang terdampak bencana. Bantuan ini juga bertujuan untuk menunjang kebutuhan hidup masyarakat terkhusus lansia, perempuan kepala rumah tangga dan anak-anak. Kerjasama yang SVA dan mitranya KPKPST yang baik juga menjadi tolak ukur manajemen yang baik sehingga program-program yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik.

Melalui program bantuan cepat tanggap dan pemulihan pasca bencana. SVA dapat melakukan tindakan kemanusiaan untuk menyelamatkan hidup dan memulihkan kembali ekonomi masyarakat yang terdampak pascabencana alam. Melalui manajemen bencana SVA dan mitranya KPKPST melakukan program pemulihan pasca bencana alam 2018 di Sulawesi Tengah yaitu (1) Bantuan Basic Paket, bertujuan untuk memberikan bantuan cepat tanggap terhadap korban sehingga

dapat mengurangi penderitaan yang dialami korban, (2) Pengumpulan data pemulihan masyarakat, bertujuan untuk mengumpulkan data para korban sehingga dapat menentukan atau mengambil tindakan terhadap korban, (3) Melakukan trauma healing di berbagai tenda-tenda pengungsi, bertujuan sebagai tindakan bagi pekerja kemanusiaan untuk dapat melakukan pendekatan psikologi dengan korban bencana, (4) Pemberian mesin, bertujuan sebagai langkah lanjutan pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana, (5) Pelatihan terhadap Perempuan, bertujuan sebagai pemberian pelatihan, skill, dan manajemen yang baik bagi perempuan guna menambahkan nilai bagi usaha yang mereka akan kembangkan guna pemulihan ekonomi mereka.

BOSOWA

B. Saran

Melalui penelitian ini penulis dapat memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan dan para akademisi pada penelitian-penelitian selanjutnya, masing-masing yaitu;

1. pemerintah pusat dan lokal dalam menagani kondisi para korban bencana terutama didaerah yang tidak dapat dijangkau oleh pemerintah. Dalam kasus yang sering dihadapi oleh NGO asing dalam memberikan bantuan kemanusiaan akibat bencana, pengambilan keputusan yang tergesa-gesa dalam program dapat mengakibatkan pemberian bantuan yang diberikan tidak dirasakan mamfaatnya bagi para korban. Sehingga perlunya NGO melakukan Manajemen dan kordinisasi yang baik dengan NGO lokal sehingga dapat mempermudah aksi kemanusiaan dalam pemberian bantuan di lokasi terdampak.
2. Disamping itu, dengan adanya kontribusi SVA di Sulawesi Tengah yang dapat meringankan penderitaan korban. Program-program yang telah dijalankan dapat dilanjutkan atau dicontoh oleh pemerintah. Sehingga dapat mempermudah pemerintah dalam memulihkan korban dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di beberapa daerah yang belum tersentuh bantuan SVA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Alexander, D., (2002). *Principles of Emergency Planning and Management*. Oxford University Press, New York.

Aid Worker Security database (AWSDB) (2011), *Spotlight on Security for national Aid Workers: Issues and Perspective*, Aid.

Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BKNPB), 2007. *Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya Di Indonesia*(2thed). Jakarta: Direktorat Mitigasi.

Buzan,B, (1991). *People, State Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War*.

Bennett, C. et al. (2016) *Time to Let Go: Remaking Humanitarian Action for the Modern Era*. London.

Core Humanitarian Standar on Quality and Accountability, (1st ed). (2014). CHS Alliance, Group URD and the Sphere Project.

Davey, Eleanor. (2013). *A History of Humanitarian System Western Origins and Foundation*. HPG Working Paper 2013. London, Overseas Development Institute.

European Universities on Professionalisation on Humanitarian Action (EUPRHA), (2013), *The State of Art of Humanitarian Action*.

Griffoli.D.M & Picot.A, (2004).*Humanitarian Negotiation: A Handbook for Securing Access, Assistance and Protection for Civilians in Armed Conflict*.

IASC, oktober (2015) *INTRODUCTION TO HUMANITARIAN ACTION A BRIEF GUIDE FOR RESIDENT COORDINATORS*. Geneva, United Nations.

Mary B. Anderson, (1999). *Do No Harm: How Aid Can Support Peace--Or War*. Boulder, Colorado.

Mader, George, Tyler, Martha Blair, (1991). *Rebuilding after Earthquakes: Lessons from Planners*. Spangle and Associates, Portola Valley, CA.

Managing Stress in Humanitarian Workers, 3rd (MSHW), 2012. Antares Foundation, Amsterdam.

National Child Traumatic Stress, (2006). *Psychological First Aid*. Field Operations Guide 2nd Edition, Network and National Center for PTSD

Statement.J, (2007). *the European Consensus on Humanitarian Aid*.

United Nations Development Programme (UNDP) (2011). *METHODOLOGICAL GUIDE FOR POST-DISASTER RECOVERY PLANNING PROCESSES*. Ecuador.

Patrick.D. R, Feener.M, & Reid.A, (2012). *ACEH pascatsunami dan pascakonflik*, Pustaka Larasan, KITLV-Jakarta.

The International Strategy for Disaster Reduction, (ISDR), (2009). *Global assessment report on disaster risk reduction: Risk and poverty in a changing climate*. Geneva, United Nations.

Peraturan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2008). *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana*. Jakarta: BNPB

Good Humanitarian Donorship (GHD), (2003). *23 Principles and Good Practice of Humanitarian Donorship*.

ICRC (2017) *Missing Migrants and Their Families: The ICRC's Recommendations to Policy-makers*, ICRC Policy Paper (https://www.icrc.org/sites/default/files/document/file_list/missing-migrants-families.pdf).

ICRC, (1996). *The Fundamental Principles of the Red Cross and Red Crescent* (https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0513.pdf).

International Strategy for Disaster Reduction (ISDR), (1994). *Yokohama strategy and plan of action for a safer world*. UN World Conference on Natural Disaster Reduction. May 2–27, Japan.

United Nations, (1989). *Resolution 44/236. United Nations General Assembly*. 85th Plenary Meeting. December 22

Pictet, J., (1979). *The Fundamental Principles of the Red Cross, Commentary*, Henry Dunant Institute, Geneva (<https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/fundamental-principles-commentary-010179.htm>)

Pemerintah Provinsi SULTENG (2019), *DAMPAK BENCANA GEMPA BUMI, LIKUIFAKSI, TSUNAMI SULAWESI TENGAH*. <http://www.depkes.go.id/resources/download/info-terkini/rakerkesnas-2019/SESI%20I/Kelompok%206/3-Dampak-Bencana-Sulawesi-Tengah.pdf>

Jurnal

Alexander D. (1997). *The Study of Natural Disasters, 1977-1997: Some Reflections on a Changing Field of Knowledge Disasters*. 21(4): pp. 284-304

Chatterjee, S., (2016). *Disaster Management definition, process, various phases and key components of preparedness*.

Darmanto, (2006). *Pengalaman dari Penanganan Bencana Alam di Yogyakarta*. Makalah RAPI V. Surakarta: Fakultas Teknik UMS.

Federal Emergency Management Agency (FEMA), (2000). *What Is Mitigation? Mitigation: Reduction Risk through Mitigation*.

Gundecha, P., Liu, H., (2012). *Mining social media: A brief introduction*. Arizona State University, Tempe, Arizona.

- Glossary of Humanitarian Terms (GHD),(2008). Available from: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/4F99A3C28EC37D0EC12_574A4002E89B4-reliefweb_aug2008.pdf.
- HERE-Geneva, (2015). *Setting Priorities to Protect Civilians in Armed Conflict*, Report on the Working Meeting held on 15 June 2015.
- Katoch, A. (2006). *The Responders' Cauldron: The Uniqueness of International Disasters Response*. Journal of International Affairs.
- Kaklauskas.A, Amaratunga.D, & Haigh.R, (2009). *Knowledge model for post-disaster management*, International Journal of Strategic Property Management.
- Mackintosh K. (2000). *The principles of humanitarian action in international humanitarian law*.
- Mirza.T, (2008). *EVEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN KEMANUSIAAN BAGI KORBA BENCANA PASCA TSUNAMI DIBANDA ACEH*.
- Mileti, D., (1999). *Disasters by Design: A Reassessment of Natural Hazards*. United States. Joseph Henry Press, Washington, DC.
- Natural Hazards Research and Application Information Center (NHRAIC), (2001). *Holistic Disaster Recovery: Ideas for Building Local Sustainability after a Natural Disaster*. University of Colorado and the Public Entity Risk Institute.
- Niland, N. et al. (2015). *Independent Whole of System Review of Protection in the Context of Humanitarian Action*. Norwegian Refugee Council.
- United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR), (2001). *Framework for Action for the Implementation of the International Strategy for Disaster Reduction*.
- United Nations Integrated Mission in Timor-Leste (UNMIT), (2010). *The Cluster System*.
- Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), (2006). *Disaster Assessment*.
- Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), n.d. *RESPONS BENCANA DI ASIA DAN PASIFIK*. ESCAP Secretariat Building, Rajdamnern Nok Avenue, Bangkok 10200, Thailand.
- Talentino, Amado, S. (2007). *The Challenges of Tsunami Disaster Response Planning and Management*. International Review for Environmental Strategies, 7(1), 1476-154.
- Shanti Volunteer Association (SVA), (2003). *2003 Annual Report 2004 Activities Plan*. <https://sva.or.jp/about/pdf/areport>.
- Shanti Volunteer Association ((SVA)), (2005). *2005 Annual Report 2006 Activities Plan*. <https://sva.or.jp/about/pdf/areport>.
- Shanti Volunteer Association ((SVA)), (2011). *2011 Annual Report 2013 Activities Plan*. <https://sva.or.jp/about/pdf/areport>.

Shanti Volunteer Association (SVA), (2014). *2014 Annual Report 2015 Activities Plan*.
<https://sva.or.jp/about/pdf/areport>.

Internet

Agustiyan.D. oktober 01, (2018). *Bencana alam gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah pada Jumat (28/09/18) lalu membuat masyarakat terisolasi dan terpaksa melakukan penjarahan untuk bertahan hidup*. Retrieved from: <https://www.finansialku.com/kondisi-pasca-gempa-penjarahan-di-palu/>

-Azanella L.A. Oktober11, (2018). *Pemulangan Relawan Internasional dari Palu Menuai Polemik*. Retrieved from: <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/11/13410981/pemulangan-relawan-internasional-dari-palu-menuai-polemik>.

Basith.A. Oktober26, (2018). *Kemos: 11 NGO asing komitmen bantu bencana Sulteng*. Retrieved from: <https://nasional.kontan.co.id/news/kemos-11-ngo-asing-komitmen-bantu-bencana-sulteng>

Bbc.com, oktober (2018). *Gempa-tsunami Palu: 'Puluhan relawan asing dikeluarkan dari Palu karena tidak berizin'*. Retrieved from: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45824299>

Firmansyah.t, oktober 10 2018. *Akses Dibatasi di Lokasi Gempa, Ini Sikap LSM Asing*. Retrieved from: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/10/10/pgd39t377-akses-dibatasi-di-lokasi-gempa-ini-sikap-lsm-asing>

Gempol.A, Juni 25, (2015). *Tragedi Tsunami Aceh Paling Hebat di Dunia Pada Abad ke-2*. Retrieved from: <https://www.kompasiana.com/rachmadgempol/550e203ca33311a52dba7ec7/tragedi-tsunami-aceh-paling-hebat-di-dunia-pada-abad-ke21>

Hasanudin A, Oktober 11, (2018). *Kabupaten Sigi Pasca Gempa, Jalan Terputus, Longsor hingga Tak Ada Listrik dan Jaringan Komunikasi*. Retrieved from: <https://www.tribunnews.com/regional/2018/10/11/kabupaten-sigi-pasca-gempa-jalan-terputus-longsor-hingga-tak-ada-listrik-dan-jaringan-komunikasi?page=2>

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), (2005). Retrieved from: www.ifrc.org.

Metrotvnews.com,2 Okt (2018). *Kondisi Terkini Kabupaten Donggala*. Retrieved from: <http://video.metrotvnews.com/breaking-news/Zke090Ob-kondisi-terkini-kabupaten-donggala>

-Nugroho.S.P ,21 October (2018). *Kerugian dan Kerusakan Dampak Bencana di Sulawesi Tengah Mencapai 13,82 Trilyun Rupiah*. Retrieved from: <https://www.bnpb.go.id/kerugian-dan-kerusakan-dampak-bencana-di-sulawesi-tengah-mencapai-1382-trilyun-rupiah>

Profil Kabupaten Donggala. Retrieved from: https://palu.bpk.go.id/?page_id=6471

Samandor.P, Oktober12, (2018). *Foreign ngos should have local partners:BNPB*. Retrieved from:
<https://sulteng.antaranews.com/berita/44630/foreign-ngos-should-have-local-partners-bnpb>

Septia.K. agus,24 (2018). Gempa Lombok, 555 Korban Meninggal, 390.529 Mengungsi. Retrieved from:
<https://regional.kompas.com/read/2018/08/24/10231051/gempa-lombok-555-korban-meninggal-390529-mengungsi>

Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Donggala <https://donggala.go.id/letak-geografis/>

Tjiptadinata.E, 28 September (2019). Setahun Bencana Pasigala Sulawesi Tengah.
<https://www.kompasiana.com/ryanzasriansyah/5d8e6ea20d8230033071dbd2/setahun-bencana-pasigala-sulawesi-tengah?page=all>

Kompas.com, Oktober 01, (2018). Penyaluran Bantuan ke Palu dan Donggala Hadapi Sejumlah Kendala, Apa Saja?. Retrieved from:
<https://nasional.kompas.com/read/2018/10/01/17431951/penyaluran-bantuan-ke-palu-dan-donggala-hadapi-sejumlah-kendala-apa-saja>

Wicaksono.A Oktober,16 (2018). *Pemerintah Akui Belum Semua Korban Gempa Palu Terima Bantuan*. Retrieved from: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181015160725-20-338604/pemerintah-akui-belum-semua-korban-gempa-palu-terima-bantuan>



BOSOWA